

**ANALISIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS 1A  
TANJUNG KARANG TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 30-74/PUU-XII/2014 TENTANG BATAS USIA  
PERKAWINAN DALAM PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**



**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh:**

**AYU RATNA DEWI ALI  
NPM : 1521010079**

**Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1440 H / 2019 M**

**ANALISIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS 1A  
TANJUNG KARANG TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 30-74/PUU-XII/2014 TENTANG BATAS USIA  
PERKAWINAN DALAM PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Ilmu Syari'ah



**Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah**

**Pembimbing I : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1440 H / 2019 M**

## ABSTRAK

### **ANALISIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS 1A TANJUNG KARANG TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30-74/PUU-XII/2014 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN DALAM PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**Oleh:  
AYU RATNA DEWI ALI**

Sehubungan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menolak pengajuan *judicial review* Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan alasan tidak ada jaminan peningkatan batas usia menikah dari usia 16 Tahun dinaikkan menjadi 18 Tahun untuk perempuan akan dapat mengurangi masalah perceraian, kesehatan, serta masalah sosial.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, diantaranya yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam menolak permohonan tersebut serta relevansinya batas usia perkawinan tersebut pada era sekarang? 2) Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 mengenai Batas Usia Perkawinan?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menolak *Judicial Review* serta pandangan Hakim Pengadilan Agama terhadap adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014.

Penelitian ini menggunakan Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam hal ini data atau informasi bersumber dari Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang dan Perpustakaan. Sumber data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dan dilengkapi oleh data-data sekunder. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode deduktif dan induktif yaitu menarik kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian berfikir dengan menganalisa data-data secara konkrit.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 sangat jelas dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa, Apabila batasan usia minimum perkawinan dinaikkan, hal itu tidak menjadi suatu jaminan untuk mengurangi atau menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat pernikahan anak, dan adapun relevansinya putusan tersebut apabila batas usia menikah dinaikkan akan berpengaruh terhadap banyaknya permohonan dispensasi menikah. Pandangan hakim pengadilan agama terhadap putusan mahkamah konstitusi sudah sangat tepat dan hakim majelis sangat setuju dengan adanya putusan tersebut, karena apabila batas usia dinaikkan justru akan dikhawatirkannya

permohonan dispensasi menikah akan semakin meningkat, dan dengan adanya batas minimal usia tersebut dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan didalam masyarakat.







**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Leikol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **AYU RATNA DEWI ALI**

NPM : **1521010079**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**

Judul Skripsi : **ANALISIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN  
KELAS 1A TANJUNG KARANG TERHADAP  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30-  
74/PUU-XII/2014 TENTANG BATAS USIA  
PERKAWINAN DALAM PASAL 7 AYAT (1)  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN.**

**DISETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang monaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.**

**NIP: 196201111994031001**

**Pembimbing II**

**Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**

**NIP: 197304142000032002**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**

**Rohmat, S.Ag., M.H.I.**

**NIP: 197409202003121003**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul : **ANALISIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS 1A TANJUNG KARANG TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30-74/PUU-XII/2014 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN DALAM PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**, disusun oleh : **AYU RATNA DEWI ALLI**, NPM : 1521010079, Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyyah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal :

**TIM DEWAN PENGUJI :**

Ketua : Dr. Liky Faisal, M.H.

Sekretaris : Juhrotul Khulwah, M.S.I.

Penguji I : Dr. H. Erina Pane, M.Hum.

Penguji II : Dr. H. M. Wagianto, S.H., M.H.

**Dekan Fakultas Syariah**

**Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**



**Khairuddin, M.H.**

196210221993031002



## MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
(يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ,  
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Sahabat Abdullah bin Mas'ud r.a. ia berkata: Rasulullah SAW, bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu mencari biaya nikah, maka hendaknya ia nikah, karena nikah itu dapat memejamkan pandangan dan menjaga/mencegah kemaluan (dari berbuat zina). Barangsiapa belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab berpuasa itu dapat mengendalikan (syahwatmu).” Hadits Muttafaq alaih.<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>Al-Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalaniy, *Bulughul Maram*, diterjemahkan Oleh M maftuhin Sholeh an Nadwi dan Muhammad Husein Muqofi, Kumpulan Hadits-hadits Hukum Islam Terjemah Bulughul Marom, (Surabaya: Al-Hidayah, t.th), hlm. 509.

## PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmaanirrahiim, dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penuh cinta dan kasih-Nya Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan rasa syukur kepada Allah SWT, Kupersembahkan rasa terimakasihku atas semua bantuan dan do'a yang telah diberikan dengan terselesainya skripsi ini kepada:

1. Ayahandaku tercinta (Ali Umar) dan Ibundaku tercinta (Sugiyati), terimakasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya kecil ini untuk ayah dan ibu yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga. Semoga ini menjadi langkah awal untuk dapat membahagiakan Mama. Terimakasih untuk Mama yang selalu membuatku termotivasi dan selalu memberi kasih sayang, selalu mendoakanku, serta menasehatiku agar menjadi lebih baik, terimakasih Ayah, Ibu.
2. Kakak dan adik-adikku, tiada yang paling mengharukan saat berkumpul bersama kalian, walaupun sering bertengkar namun hal tersebut selalu menjadi warna yang tidak akan pernah bisa tergantikan, terimakasih atas doa dan semangat kalian selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat aku persembahkan.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## **RIWAYAT HIDUP**

Ayu Ratna Dewi Ali dilahirkan di Desa Palas, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, pada tanggal 14 Maret 1997. Anak kedua dari lima bersaudara, buah cinta kasih pasangan Ali Umar dengan Sugiyati.

Menempuh pendidikan berawal dari pendidikan Sekolah Dasar Negeri ditempuh di SD Negeri 2 Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan selesai pada tahun 2009. Melanjutkan sekolah lanjutan tingkat pertama di SMP Negeri 2 Merbau Mataram, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan selesai pada tahun 2012, sedangkan pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas ditempuh pada SMK Satu Nusa 2 Bandar Lampung, Kecamatan Teluk Betung, Kota Bandar Lampung selesai pada tahun 2015, dan pada tahun yang sama (2015) meneruskan jenjang pendidikan starata satu (S.1) di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah pada Jurusan Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah.

Selama jadi mahasiswa penulis aktif di Organisasi Intra Kampus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bahasa, Organisasi Ekstra Kampus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung, Komisariat Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, dan Lembaga Pers Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung.

## KATA PENGANTAR

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufiq dan hidayah -Nya dalam kehidupan ini. Tiada kata yang pantas diucapkan selain kalimat syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kelapangan berfikir, membukakan pintu hati, dengan ridho dan inayah-Nya dan diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS 1A TANJUNG KARANG TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30-74/PUU-XII/2014 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN DALAM PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**.

Sholawat beriringkan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan seperti kita rasakan hingga saat ini. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha sendiri, banyak sekali menerimamotivasi bantuan pemikiran, materil dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M.Ag. beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya.
3. Ketua jurusan Al- Ahwal Al- Syakhshiyah Bapak Rohmat, S.Ag., M.H.I. dan sekretaris jurusan Al- Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Bapak Abdul Qodir Zaelani, M.H.I. yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I Bapak Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H. dan pembimbing II Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. yang telah banyak memberikan pengetahuan, masukan dan membimbing dengan penuh kesabaran, kesungguhan serta keikhlasan.



5. Ketua Jurusan Periode lalu Bapak Marwin, S.H., M.H., dan sekretaris jurusan Bapak Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. yang telah memberikan semangat, motivasi, serta bimbingan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan, serta staf dan karyawan fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung atas kesediaannya membantu dalam menyelesaikan syarat-syarat administrasi.
7. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan dispensasi dan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam skripsi ini.
8. Segenap guruku SD, SMP dan SMA yang telah mengajar dengan penuh kasih sayang.
9. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan AS angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat, motivasi, kebersamaan dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini.
10. Kedua orangtuaku, Ayah Ali Umar dan Ibu Sugiyati, terimakasih tak terhingga atas dukungan do'a dan kasih sayang yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan umur panjang untuk ayah ibu. Kepada kakak (Gita Oktaviana Murtafiah Sahani), dan adik-adik (Agista Khairul Jannah, M Ghifari Alkhusairi Ali, Ratu Zalfa Indrayanti RA) terimakasih atas dukungan, do'a serta semangat dalam penyelesaian tugas akhir ini.
11. Keluargaku di Himpunan Mahasiswa Islam, kanda yunda adinda serta teman-teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan support dan doa demi penyelesain skripsi ini.
12. Teristimewa sahabat dan teman-temanku tercinta Sela Eviyana, Sukma Suci Lestari, Vita Tya Monika, Tri Wahyuni, Rekno Eka Devica, Gia Noviansah, Rosdiana, Fernanda Khatami, Febry Saputra, Muhammad Abdurrohman, dan Aznan Siregar. Terimakasih atas motivasi, dukungan, doa, dan kebersamaannya.
13. Keluarga besar Kuliah Kerja Nyata Kelompok 174 Desa Rulung Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan Kawan-kawan Pelatihan Training of Trainer, Intermediate Training, LKK, dan sebagainya. Terimakasih atas doa, canda tawa, dan semangat yang telah kalian diberikan.
14. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku. *Jazakumullah.*
15. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Aamiin Yarobbal a'lamin.

Bandar Lampung, April 2019

Penulis

**AYU RATNA DEWI ALI**  
NPM. 1521010079





## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	9

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Perkawinan .....	16
1. Pengertian Perkawinan.....	16
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	20
3. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	22
4. Prinsip-prinsip Perkawinan .....	31
5. Proses Menuju Perkawinan .....	32
6. Tujuan Perkawinan.....	38
B. Batas Usia Perkawinan.....	40
1. Usia Perkawinan dalam Al-Qur'an .....	41
2. Usia Perkawinan dalam Fiqh.....	42
3. Usia Perkawinan dalam Perundang-undangan .....	45
4. Usia Perkawinan dalam Hukum Perdata .....	48

C. Anak dan Usia Dewasa .....	52
1. Anak dalam Hukum Positif di Indonesia .....	52
2. Usia Dewasa.....	56
3. Pandangan Psikologis dan Biologis tentang Usia Dewasa.....	60

### **BAB III LAPORAN PENELITIAN**

A. Tinjauan tentang Mahkamah Konstitusi .....	62
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi .....	62
2. Sejarah Mahkamah Konstitusi .....	63
3. Fungsi Mahkamah Konstitusi.....	65
4. Asas-asas Mahkamah Konstitusi.....	68
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014.....	69
1. Duduk Perkara.....	69
2. Alasan-alasan Pemohon Mengajukan <i>Judicial Review</i> Undang-undang Perkawinan .....	72
3. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi.....	76
4. Amar Putusan .....	82
C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang ....	83

### **BAB IV ANALISA DATA**

A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menolak permohonan <i>Judicial Review</i> serta relevansinya batas usia perkawinan pada era saat ini .....	86
B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Batas Usia Perkawinan.....	93

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	99
B. Saran.....	100

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagaimana diketahui bahwa skripsi ini berjudul **"Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"**. Sebelum penulis memasuki pokok bahasan dalam skripsi ini, terlebih dahulu penulis menganggap perlu diberikan pengertian yang terdapat dalam kalimat judul yang terdapat dalam judul skripsi ini. Hal ini berguna untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca, maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu diberi batasan dan penegasan yaitu :

*Analisis* adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>1</sup>

*Pandangan* adalah suatu peninjauan melalui sudut pandang secara meluas.<sup>2</sup> Maksud penulis adalah bagaimana hakim memandang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang batas usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>1</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke 4, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 83

<sup>2</sup> Budiono M.A, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, (Surabaya: Karya Harapan, 2005), hlm. 495

*Hakim Pengadilan* adalah Hakim pada Pengadilan Agama dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama.<sup>3</sup> Dalam hal ini adalah para Hakim diruang lingkup Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.

*Putusan* adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara atau pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan.<sup>4</sup>

*Mahkamah Konstitusi* adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan,<sup>5</sup>

*Perkawinan* adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka maksud judul ini adalah melakukan analisis terhadap Pandangan Hakim Pengadilan agama kelas 1A Tanjung Karang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang Batas Usia Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dalam pasal 1 ayat (1)

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi ke-5, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 210

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 2

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu :

1. Alasan Obyektif

- a. Mengingat masalah usia perkawinan adalah suatu hal yang sangat ramai di diskusikan dan sampai saat ini tidak pernah lepas dari perbedaan pendapat.
- b. Setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 mengenai uji materiil Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentang batas usia perkawinan, menjadi hal yang menarik untuk di analisis kembali dan di diskusikan dengan hakim pengadilan agama kelas 1A tanjung karang.

2. Alasan Subjektif

- a. Sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang didapatkan penulis selama menjalani kuliah di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah.
- b. Literatur dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini tersedia di perpustakaan, sehingga dengan mudah skripsi ini diselesaikan.

### C. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembangbiak, dan melestarikan hidupnya. Seiring perkembangan zaman yang semakin maju, masalah yang timbul dalam bidang hukum keluarga pun ikut berkembang. Perkawinan merupakan salah satu hukum yang sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat, perkawinan



merupakan faktor yang paling penting sebagai salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, perkawinan merupakan suatu hukum, agama dan masyarakat.

Meskipun hukum agama dan peraturan perundang-undangan telah mengatur sedemikian rupa mengenai hukum perkawinan dengan baik dan benar, namun masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi didalam masyarakat dengan berbagai aspek. Secara bahasa kata *Az-zawaj* (perkawinan) dari akar *zawwaja* dengan tasyid *waw*. Kata *zawj* yang diartikan jodoh atau berpasangan berlaku bagi laki-laki dan perempuan.<sup>7</sup> Kata nikah berasal dari bahasa arab (النكاح) yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja (نكح) Sinonimnya (زواج) kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Nikah secara etimologi bermakna *al-wath'u* bersetubuh atau bersenggama, *adh-dhammu* menyatukan atau menggabungkan dan *al-Ijam'u* mengumpulkan atau menghimpun.<sup>8</sup> Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram*. Allah swt berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

<sup>7</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 36.

<sup>8</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 6-7

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya<sup>9</sup> Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain<sup>10</sup>, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>11</sup>*

Islam telah menawarkan sebuah konsep dengan persyaratan *istita'ah* (kemampuan) bagi seseorang yang menghendaki pernikahan. Hal ini merupakan patokan yang diberikan oleh Rasulullah sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al Bukhari, yaitu :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *Dari Sahabat Abdullah bin Mas'ud r.a. ia berkata: Rasulullah SAW, bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu mencari biaya nikah, maka hendaknya ia nikah, karena nikah itu dapat memejamkan pandangan dan menjaga/mencegah kemaluan (dari berbuat zina). Barangsiapa belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab berpuasa itu dapat mengendalikan (syahwatmu)." Hadits Muttafaq alaih.<sup>12</sup>*

Kemampuan yang dimaksud dalam hadist tersebut ialah kemampuan secara fisik (biologis), mental (kejiwaan), dan materi yang meliputi biaya proses pernikahan dan juga pemenuhan kebutuhan dalam keluarga. Berkaitan

<sup>9</sup> Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

<sup>10</sup> Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Hilal, 2009), hlm. 77.

<sup>12</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalaniy, *Bulughul Maram*, Diterjemahkan oleh M Maftuhin Sholeh an-Nadwi dan Muhammad Husein Muqofi, *Kumpulan Hadist-Hadist Hukum Islam Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya: Al-Hidayah,t.th), hlm. 509

dengan usia perkawinan, menarik untuk dicermati bersama tentang ketentuan dari Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 (enam belas) tahun.” Seperti yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 didasarkan pada pertimbangan kemashlahatan. Adanya ketentuan ini jelas menimbulkan pro dan kontra dalam penerimaannya karena dalam Al-Qur’an dan Hadist yang notabene menjadi sumber dari hukum Islam tidak memberikan ketetapan yang jelas dan tegas tentang batas minimal usia seseorang untuk melangsungkan suatu perkawinan. Kedua hukum tersebut hanya menetapkan dugaan, isyarat, dan tanda-tanda usia kedewasaan.

Diberbagai penjuru dunia pernikahan anak merupakan masalah sosial dan ekonomi yang diperumit dengan tradisi budaya dalam kelompok masyarakat. Stigma sosial mengenai pernikahan setelah melewati masa pubertas yang dianggap aib dikalangan tertentu meningkat pula angka kejadian pernikahan anak. Motif ekonomi, tercapainya keamanan sosial, dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua menyetujui pernikahan dini.<sup>13</sup>

Adapun alasan dari penetapan batas usia minimal untuk menikah bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun dapat dilihat dalam peraturan penjelasan Pasal 7 ayat 1 undang-undang perkawinan yang menyebutkan bahwa tujuan dari adanya ketentuan batas minimal usia untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah untuk menjaga kesehatan suami, istri, dan

---

<sup>13</sup> Ahmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Muslim*, Jurnal Al-Adalah, Vol.12, No. 2, 2015, hlm. 4



keturunan. Berdasarkan bunyi penjelasan ini maka bisa dilihat bahwa ketentuan mengenai batas usia minimal untuk menikah dalam Pasal tersebut nampak lebih melihat pada segi kesiapan fisik atau biologis semata, belum sampai melihat pada perlunya mempertimbangkan kesiapan psikis calon mempelai. Padahal kesiapan mental bagi calon mempelai sangat penting dipertimbangkan guna memasuki gerbang rumah tangga, karena sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan mental maka hal itu sering menimbulkan masalah disuatu hari bahkan tidak sedikit yang mengalami berantakan ditengah jalan.

Selain ketidaksiapan mental, bagi pasangan tersebut dapat mengancam kesehatan reproduksi dan menimbulkan masalah terkait pendidikan anak. Alasan dan dalil Mahkamah Konstitusi menolak didalam putusan tersebut yaitu dengan alasan bahwa tidak ada jaminan apabila batas usia dirubah akan berdampak signifikan pada turunnya tingkat perceraian maupun menyelesaikan berbagai masalah kesehatan maupun sosial. Mahkamah Konstitusi juga telah mempertimbangkan bahwasannya usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang apapun pilihannya tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang tentang kondisi sosial pada saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di undangkan, pernikahan pada anak usia 16 tahun merupakan hal yang lumrah mengingat rendahnya

---

<sup>14</sup>Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang Batas Usia Perkawinan

jumlah anak yang sekolah pada saat itu. Hal ini tentu berbeda dengan kondisi yang ada pada saat ini, ketika pendidikan anak Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Apabila batas usia ini tidak diubah, tentunya hal ini tidak sejalan dengan program wajib belajar 12 tahun yang di usung oleh pemerintahan Jokowi. Jika seorang anak dapat masuk SD umur 7 tahun, seharusnya pada usia 16 tahun ia masih duduk dibangku SMP.

Berdasarkan pemaparan di atas dan didorong oleh rasa tanggung jawab sebagai masyarakat dan akademisi, maka penulis mencoba mengangkat permasalahan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 mengenai batas usia perkawinan dan penulis berharap hakim Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang dapat memberikan pandangan sesuai dengan pengalaman serta keilmuan yang dimilikinya, sehingga pandangannya sebagai narasumber dalam penelitian ini akan menjadi gagasan baru dalam menyikapi putusan hakim mahkamah konstitusi mengenai batas usia perkawinan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menolak permohonan tersebut serta relevansinya batas usia perkawinan tersebut pada era sekarang?
2. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 mengenai Batas Usia Perkawinan?

## E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menolak permohonan *juducial review* Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta relevansinya pada era sekarang.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pandangan hakim pengadilan agama kelas 1A tanjung karang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 mengenai batas usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun kegunaan skripsi ini adalah :

1. Memberikan kontribusi dalam upaya untuk mengkritisi fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.
2. Memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan umumnya dan hukum Islam di Indonesia pada khususnya.

## F. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.<sup>15</sup>

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara-cara berfikir dan berbuat yang

---

<sup>15</sup> Cholid Norobuko dan Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997), hlm. 1



dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian.<sup>16</sup>

Metode penelitian merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi data secara akurat.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

# 1. Jenis dan sifat penelitian

## a. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*Field Research*) atau disebut juga dengan penelitian kaneah yaitu penelitian terhadap suatu kaneah kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.<sup>17</sup> Penelitian lapangan ini adalah mengetahui pendapat hakim pengadilan agama kelas 1A Tanjung Karang Bandarlampung, maka penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang, Lampung.

Selain menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah pengumpulan data

---

<sup>16</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan ke-7, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 20

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Ke-4, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 56

dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan.<sup>18</sup>

Kepustakaan (*Library Research*) adalah mengadakan penelitian dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat bahan dari berbagai literatur yang berhubungan langsung dan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

#### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yaitu suatu objek yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana pandangan hakim pengadilan agama kelas 1A Tanjung Karang mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang Batas Usia Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sedangkan yang dimaksud dengan analisis sendiri sebagaimana yang dikutip oleh Kaelan M.S. dari Patton yaitu “suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori dan uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran, dan interpretasi data”.<sup>20</sup> Jadi, penelitian ini hanya melukiskan, memaparkan,

---

<sup>18</sup> Kartini Kartono, *Op. Cit.*, hlm. 33

<sup>19</sup> Kaelani, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: padigma, 2005), hlm. 58

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 68

dan melaporkan suatu keadaan obyek tanpa menarik kesimpulan umum, kemudian pada akhir pembahasan dilakukan suatu analisis kritis.

## 2. Data dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai-nilai numerik (angka). Sedangkan sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>21</sup>

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan atau obyek yang diteliti atau ada hubungannya dengan obyek yang diteliti. Dengan demikian sumber data pada penelitian lapangan berasal dari informan langsung dari Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.
- b. Sumber data sekunder, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku fiqh tentang nikah, majalah, kitab-kitab fiqh, atau makalah-makalah literatur lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.
- c. Sumber data tersier, yaitu kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, surat kabar dan majalah.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik kepustakaan dan lapangan, teknik kepustakaan yaitu penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hlm. 114



bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.<sup>22</sup>

Penelitian perpustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah serta mempelajari berbagai bahan bacaan atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis bahas, baik berupa Al-Qur'an, Al-Hadist, buku-buku karangan yang berkaitan dengan pembahasan batas usia perkawinan dan buku lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini. Kemudian didalam penelitian lapangan ini penulis menggunakan metode interview, metode observasi, dan metode dokumentasi, yaitu sebagai berikut:

a. Metode Interview

Menurut Mardalis bahwa *interview* adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan hadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>24</sup>

Penelitian ini menggunakan interview bebas terpimpin, artinya penginterview memberikan kebebasan kepada orang yang diinterview untuk memberi tanggapan atau jawaban sendiri. Metode interview ini dilakukan dengan para hakim pengadilan agama kelas 1A Tanjung Karang, Lampung.

---

<sup>22</sup> Kartini Kartono, *Op. Cit.*, hlm. 78

<sup>23</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Sebagai Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 64

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hlm. 115

#### b. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang diselidiki atau diteliti. Sebagaimana dijelaskan oleh Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi bahwa metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah observasi non partisipan. Penulis berlaku sebagai pengamat dan tidak mengambil bagian kehidupan yang diobservasi dengan tujuan agar dapat diperoleh keterangan yang obyektif.

#### c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, buku langgar.<sup>26</sup> Metode dokumentasi adalah suatu cara yang untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan melalui catatan tertulis dalam sebuah penelitian. Metode ini peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi data yang dibutuhkan yang berkaitan dalam penelitian ini.

#### 4. Metode pengolahan data

Data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 34

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hlm. 23

a. Editing

Editing adalah pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan selanjutnya.

b. *Sistematizing* atau sistematisasi

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematis bahasa berdasarkan urutan masalah. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis. Dan data yang sudah di edit dan diberi tanda dikelompokkan menurut klasifikasi dan urutan masalah.<sup>27</sup>

5. Analisis Data

Analisa data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yang valid dan berkualitas. Dalam menganalisa data penyusun menggunakan metode deduktif dan induktif.

Metode deduktif yaitu menarik kesimpulan berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus.<sup>28</sup> Metode induktif yaitu cara berfikir dengan menganalisa data-data atau fakta fakta secara konkrit kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan atau jeneralisasi.

---

<sup>27</sup> Suharsimin Ari Kunto, *Op.Cit.* hlm.29

<sup>28</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1983), hlm. 42

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran.<sup>29</sup>

Sebutan lain untuk perkawinan adalah *Az-zawaj*, kata *Az-zawaj* (perkawinan) dari akar *zawwaja* dengan tasyid *waw*. Kata *zawj* yang diartikan jodoh atau berpasangan berlaku bagi laki-laki dan perempuan.<sup>30</sup> Secara harfiah kata *Az-zawaj* berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai, dan memperistri.<sup>31</sup>

Secara terminologi, perkawinan menurut mazhab Maliki adalah akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita. Dengan akad tersebut seseorang akan terhindar dari perbuatan haram (zina). Menurut mazhab Syafi'i perkawinan adalah akad yang didalamnya terdapat lafazh perkawinan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur.

Perkawinan menurut Abu Hanifah adalah akad yang dilakukan untuk dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja. Pengukuhan yang dimaksud adalah suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketentuan pembuat syariah bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling memuat 'aqad

---

<sup>29</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Cetakan Keempat, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hlm. 3

<sup>30</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 36.

<sup>31</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Cetakan Kedua Puluh Lima, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002) hlm. 1461

(perjanjian) yang bertujuan hanya untuk sekedar mendapatkan kenikmatan semata.<sup>32</sup>

Perkawinan adalah *sunnatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan.<sup>33</sup> Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang pada dasarnya adalah *mubah* tergantung kepada tingkat mashlahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam membagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. *Mashlahat* yang diwajibkan oleh Allah Swt, bagi hamba-Nya. *Mashlahat* wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama) dan *mutawasitth* (tengah-tengah). Mashlahat yang paling utama adalah mashlahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mafsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan kemashlahatan yang paling besar, kemashlahatan jenis ini wajib dikerjakan.
- b. Mashlahat yang *disunnahkan* oleh *syar'i* kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat mashlahat paling tinggi berada sedikit dibawah tingkat mashlahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan kebawah, *mashlahat sunnah* akan sampai pada tingkat mashlahat yang ringan yang mendekati mashlahat mubah.
- c. *Mashlahat Mubah* bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai mashlahat atau penolakan terhadap *mafsadah*. Mashlahat mubah dapat dirasakan secara langsung, sebagian diantaranya lebih

---

<sup>32</sup> M Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004), hlm. 11

<sup>33</sup> H.S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Edisi ke-2, hlm. 1



bermanfaat dan lebih besar kemashlahatannya dari sebagian yang lain.

Maslahat mubah ini tidak berpahala.<sup>34</sup>

Berdasarkan definisi ini dan definisi dari keempat mazhab diatas, jelas bahwasanya yang menjadi inti pokok perkawinan adalah ‘aqad (perjanjian) yaitu serah terima antaraorang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria.Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah menjadi pada saat ‘aqad nikah itu, di samping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami isteri.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 merumuskan bahwa ikatan suami isteri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami isteri. Hidup bersama suami isteri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami isteri, tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami isteri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, memberikan devinisi perkawinan sebagai berikut : “Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, terjemah Saefullah Ma’shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 558-559

<sup>35</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian fiqh nikah lengkap*, cetakan Ketiga, (Depok: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 351

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Undang-undang Perkawinan ini hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan.<sup>36</sup> Hal ini diatur dalam Bab II tentang Syarat-syarat Perkawinan dari pasal 6 sampai 12. UUP melihat persyaratan perkawinan itu hanya menyangkut persetujuan kedua calon dan batasan umur serta tidak adanya halangan perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut. Ketiga hal ini sangat menentukan untuk pencapaian tujuan perkawinan itu sendiri.

Berbeda dengan Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum ketika membahas rukun dan syarat perkawinan lebih cenderung mengikuti sistematika fikih, yakni dengan mengaitkan unsur rukun dan syarat.<sup>37</sup> Hal ini sebagaimana diatur dalam Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan dari pasal 14 hingga pasal 29. Kendatipun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan lima rukun perkawinan sebagaimana fikih, ternyata dalam uraian persyaratannya KHI mengikuti Undang-undang Perkawinan yang melihat syarat hanya berkenaan dalam persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur. Namun, pada pasal-pasal berikutnya juga dibahas tentang wali, saksi, akad nikah, dengan sistematikanya diletakkan pada bagian yang terpisah dari pembahasan rukun, dimana hal ini tidak mengikuti skema fikih juga tidak mengikuti Undang-undang Perkawinan yang hanya membahas persyaratan perkawinan menyangkut kedua calon mempelai.

---

<sup>36</sup> Amiur Nuruddin, *Op. Cit.*, hlm. 67

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 72

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

### a. Dasar Hukum menurut Al-Qur'an

Berkaitan dengan dasar hukum perkawinan, Al-Qur'an telah membicarakan dalam beberapa ayat, yaitu sebagai berikut :

QS. Al-A'raf: 189

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ  
فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ  
الشَّاكِرِينَ

Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu), kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terasuk orang-orang yang bersyukur".<sup>38</sup>

QS. An-Nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian<sup>39</sup> diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Surabaya: Penerbit Fajar Mulya, t.th), hlm. 175.

<sup>39</sup> Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

QS. An-Nahl: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ  
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ  
اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?<sup>40</sup>

b. Dasar hukum menurut Al-Hadist

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ص قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ. وَ  
قَالَ بَعْضُهُمْ: أَصَلِّي وَ لَا أَنَامُ. وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ وَ لَا أَفْطِرُ، فَبَلَغَ  
ذَلِكَ النَّبِيَّ ص فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَ كَذَا. لَكِنِّي أَصُومُ وَ أَفْطِرُ  
وَ أَصَلِّي وَ أَنَامُ وَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. احمد  
و البخارى و مسلم

Artinya: Dari Anas bahwasannya ada sebagian sahabat Nabi SAW yang berkata: “aku tidak akan kawin”, sebagian lagi berkata, “aku akan sholat terus-menerus dan aku tidak akan tidur”, dan sebagian lagi berkata, “aku akan berpuasa terus-menerus”. Kemudian hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, “Bagaimanakah keadaan kaum itu, mereka mengatakan demikian dan demikian, padahal aku berpuasa dan berbuka, sholat dan tidur, dan akupun mengawini wanita. Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, bukanlah dari golonganku. (HR. Ahmad, Bukhari, dan Muslim).<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Fajar Mulya, t.th), hlm. 274.

<sup>41</sup> HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي الطَّبْرَانِي فِي الْاَوْسَطِ وَالْحَاكِمِ. وَ قَالَ الْحَاكِمِ صَحِيحِ الْاِسْنَادِ

Artinya: Dari Anas R.A, bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda, "Barangsiapa yang Allah telah memberi rezeki kepadanya berupa istri yang shalihah, berarti Allah telah menolongnya pada separuh agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah untuk separuh sisanya. (HR. Tabrani didalam Al-Ausath, dan Hakim. Hakim berkata shahih sanadnya).

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي رَوَايَةُ الْبَيْهَقِيِّ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah dia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya". (HR. Baihaqi).

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan dari segi hukum. Sehingga baik rukun dan syarat keduanya harus dipenuhi agar suatu perbuatan hukum dikatakan sah. Dalam ilmu Ushul Fiqh, syarat bermakna sesuatu yang mesti ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, sedangkan rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat ada yang berkaitan dengan rukun dan ada pula syarat yang berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.



Menurut Hanifah, nikah itu terdiri dari syarat-syarat yang terkadang berhubungan dengan *sighat*, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. Menurut Syafi'iyah melihat syarat perkawinan itu ada kalanya menyangkut *sighat*, wali, calon suami-istri dan juga *syuhud*. Berkenaan dengan rukunya, bagi mereka ada lima, calon suami-istri, wali, dua orang saksi, dan *sighat*.<sup>42</sup>

Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan harus ada dalam suatu perkawinan yakni: *sighat* akad nikah, calon mempelai lelaki, calon mempelai wanita, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan dan mahar atau mas kawin. Sehingga kesimpulan, bahwasanya Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan ada lima yakni:<sup>43</sup>

- a. Calon Suami.
- b. Calon Istri.
- c. Wali Nikah.
- d. Saksi Nikah.
- e. Ijab Qabul

Kelima rukun nikah tersebut masing-masing memiliki syarat-syarat tertentu, rincianya adalah sebagai berikut:

- a. Calon Suami, syarat-syaratnya:
  - 1) Beragama Islam.
  - 2) Laki-laki.
  - 3) Jelas Orangnya.

---

<sup>42</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 17

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 186

- 4) Dapat memberikan persetujuan.
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

b. Calon Istri, syarat-syarat:

- 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani (pendapat sebagian ulama).
- 2) Perempuan.
- 3) Jelas orangnya.
- 4) Dapat diminta persetujuannya.
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

c. Wali Nikah, syarat-syarat:

- 1) Laki-laki.
- 2) Dewasa.
- 3) Mempunyai hak perwalian.
- 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

d. Saksi Nikah, syarat-syarat:

- 1) Minimal dua orang laki-laki.
- 2) Hadir dalam Ijab qabul.
- 3) Dapat mengerti maksud akad.
- 4) Islam.
- 5) Dewasa.

e. Ijab Qabul, syarat-syarat:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- 3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut

- 4) Antara ijab dan qabul bersambung
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon
- 8) mempelai atau walinya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Fuqaha sepakat bahwa mahar itu termasuk syarat sunnah nikah, dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Rusdy dalam kitabnya Bidayah al-Mujtahid. Dasarnya adalah Firman Allah dalam Al-Quran surat An-nisa ayat (4):

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ خِلَّةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.<sup>44</sup> kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Ayat ini ditujukan untuk suami dan wali perempuan. Allah memerintahkan kepada mereka untuk memberikan mahar kepada wanita/istri sebagai pemberian suka rela. Perintah ini merupakan kewajiban. Dan kalau si istri berbaik hati, memberikan secara ikhlas dari mahar

---

<sup>44</sup> Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

tersebut, baik sebagian atau malah seluruhnya, maka suami/wali boleh memakannya dengan penuh kelapangan dan berharap makanan tersebut akan membawa akibat baik.

Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Kata mahar yang telah menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *al-mahr*, jamaknya *al-muhur* atau *al-muhurah*. Kata yang semakna dengan mahar adalah *al-shadaq*, *nihlah*, *faridhah*, *ajr*, *hiba*, *uqr*, *alaiq*, *thaul* dan nikah.<sup>45</sup> Secara istilah, mahar diartikan sebagai pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah.

Pemberian mahar dalam penentuannya harus mempertimbangkan atas kesederhanaan dan kemudahan. Maksudnya adalah, bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami dan tidak boleh pula terkesan memaksa atau apa adanya, sehingga calon istri tidak merasa dilecehkan atau disepelkan.<sup>46</sup> Oleh karenanya, dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebutkan pada Pasal 30, bahwa pemberian mahar, baik jumlah, bentuk maupun jenisnya berdasarkan kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak, dalam hal ini calon suami dan isteri.

Syarat mahar di dalam Islam memiliki hikmah yang cukup dalam seperti:

---

<sup>45</sup> Amir Syarifiddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 84

<sup>46</sup> Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, (Yogyakarta: Prima Shopi, 2003), hlm 23 dalam Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Op. Cit.*, hlm. 66-67

- a. Untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, karena keduanya saling membutuhkan.
- b. Untuk member penghargaan terhadap wanita, dalam arti bukan sebagai alat tukar yang mengesahkan pembelian.
- c. Untuk menjadi pegangan bagi istri bahwa perkawinan mereka telah diikat dengan perkawinan yang kuat, sehingga suami tidak mudah menceritakan istrinya sesukanya.
- d. Untuk kenangan dan pengikat kasih sayang antara suami istri.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Undang-undang Perkawinan ini hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan.<sup>47</sup> Hal ini diatur dalam Bab II tentang Syarat-syarat Perkawinan dari Pasal 6 sampai 12. Undang-undang Perkawinan melihat persyaratan perkawinan itu hanya menyangkut persetujuan kedua calon dan batasan umur serta tidak adanya halangan perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut. Ketiga hal ini sangat menentukan untuk pencapaian tujuan perkawinan itu sendiri.

Berbeda dengan Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam ketika membahas rukun dan syarat perkawinan lebih cenderung mengikuti sistematika fikih, yakni dengan mengaitkan unsur rukun dan syarat.<sup>48</sup> Hal ini sebagaimana diatur dalam Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan dari Pasal 14 hingga Pasal 29. Kendatipun KHI menjelaskan lima rukun perkawinan sebagaimana fikih, ternyata dalam

---

<sup>47</sup> Amiur Nuruddin, *Op. Cit.*, hlm. 67

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 72



uraian persyaratannya KHI mengikuti Undang-undang Perkawinan yang melihat syarat hanya berkenaan dalam persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur. Namun, pada pasal-pasal berikutnya juga dibahas tentang wali, saksi, akad nikah, dengan sistematikanya diletakkan pada bagian yang terpisah dari pembahasan rukun, dimana hal ini tidak mengikuti skema fikih juga tidak mengikuti Undang-undang Perkawinan yang hanya membahas persyaratan perkawinan menyangkut kedua calon mempelai.

Selain itu Wahhab az-Zuhaili membagi persyaratan perkawinan menjadi 4 macam, yaitu :

a. Syarat Akad Perkawinan

Syarat akad adalah yang terkait dengan kesempurnaan rukun atau prinsip perkawinan. Menurut mayoritas ulama fiqh, jika salah satu tidak terpenuhi maka perkawinan terancam batal. Syarat ini tersimpul dalam beberapa syarat yang ditujukan kepada kedua belah pihak serta yang terdapat didalam ijab dan qabul. Persyaratan kepada kedua belah pihak yakni harus yang bersangkutan melakukan akad terhadap dirinya atau sebagai wakil yang akan kawin, keduanya harus cakap bertindak hukum (baligh berakal). Jika tidak, maka akadnya tidak boleh dilangsungkan atau berakibat batal sebab disini tidak terdapat kesempurnaan maksud dan tujuan akad yang dibenarkan oleh agama. Selanjutnya, kedua belah pihak dapat mendengarkan dan memahami ucapan satu sama lain ketika mengucapkan akad, kendati melalui perantara seperti surat bagi pihak yang tidak hadir. Adapun persyaratan khusus bagi calon mempelai wanita yaitu :

- 1) Benar-benar perempuan sejati.
- 2) Tidak termasuk perempuan yang haram dikawini.

Syarat shigat akad (ijab qabul) mencakup empat hal, yakni :

- a) Harus dalam satu tempat atau majelis bagi yang bisa hadir.
- b) Ada persesuaian ijab dengan qabul serta ukuran mahar yang ditetapkan.
- c) Ijab dan qabul saling berhubungan, tidak dibatasi dengan ucapan lain.
- d) Dapat diselesaikan dalam waktu itu juga.

b. Syarat yang harus disempurnakan berdasarkan susunan akad

Menurut mazhab Hanafi, jika salah satu persyaratan itu tidak terpenuhi, maka perkawinan dianggap *fasid* (gagal), namun mayoritas ulama menganggap gagal. Syarat ini mencakup sepuluh macam, yakni :

- 1) Dihalalkan pada waktu berikutnya (syarat *furu'iyah*) seperti mengawini dua bersaudara setelah salah satunya meninggal, atau dihalalkan sejak awal seperti bagi yang bukan mahram.
- 2) Tidak dibatasi oleh waktu tertentu.
- 3) Ada saksi.
- 4) Keduanya sama-sama rela atau bebas berikhtiar.
- 5) Jelas identitasnya.
- 6) Bukan ketika ihram.
- 7) Ada mahar (baik *musamma* atau *mitsil*).
- 8) Berakad tidak secara diam-diam.

- 9) Salah satu pihak tidak berpenyakit yang menyebabkan kematian.
- 10) Ada wali
- c. Syarat yang berkaitan dengan tindakan kedua belah pihak yang terkait dengan keabsahan akad

Menurut Hanafi dan Maliki perkawinan ditangguhkan apabila jika salah satu syarat tidak ada. Persyaratan itu mencakup lima hal, yakni :

- 1) Keduanya punya kewenangan bertindak untuk melakukan akad.
- 2) Suami bebas bertindak atas dirinya sendiri.
- 3) Harus ada penjelasan keizinan wali dekat sebelum dilimpahkan ke wali jauh.
- 4) Jika diwakili, maka yang menerima wakil harus menjalankan tugasnya menurut kehendak yang mewakilkan.
- 5) Tidak sah akad bagi perempuan yang tidak mempunyai wali.
- d. Syarat Lazim

Syarat ini terkait dengan kelestarian akad. Jika salah satu syarat tidak ada, diserahkan kepada kedua belah pihak untuk meneruskan atau mem-*fasakh* perkawinan, syarat ini mencakup tiga hal, yaitu :

- 1) Jika ayah atau kakek tidak berwenang bertindak karena kurang waras, lalu dikawinkan oleh saudara atau dikawinkan dalam masa kecil, maka keduanya boleh melakukan *fasakh* ketika halangan itu berlalu.
- 2) Kedua belah pihak harus setara.
- 3) Suami bebas dari cacat yang menyengsarakan isteri, seperti pengebirian, impotensi dan sejenisnya.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Yaswiman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 195-197

#### 4. Prinsip-prinsip Perkawinan

Ada beberapa prinsip perkawinan yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Tuhan. Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak Asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut beberapa prinsip dalam perkawinan yaitu:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami-istri perlu saling membantu, melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan material dan spiritual.
- b. Bahwa suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menganut asas monogami hanya apabila dikehendaki oleh orang yang bersangkutan karena hukum dan agama dan yang bersangkutan yang mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang meskipun dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Bahwa calon Suami-istri harus betul-betul siap jiwa dan raganya untuk dapat melakukan dan melangsungkan perkawinan agar supaya dapat

mewujudkan tujuan perkawinan secara tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

- e. Karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip mempersatukan terjadinya perceraian untuk dapat memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan rumah masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu diputuskan bersama.
- g. Memenuhi dan Melaksanakan Perintah Agama sebagaimana telah dijelaskan pada uraian yang lalu bahwa perkawinan adalah sunnah Nabi.

Itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur perkawinan itu memberikan batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat-syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan itu *batal* atau *fasid*. Demikian pula agama memberikan ketentuan lain disamping rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam perkawinan, dan juga harus adanya kemampuan.<sup>50</sup>

## 5. Proses Menuju Perkawinan

### a. Memilih Istri

Sesungguhnya pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi insting dan berbagai keinginan yang bersifat materi. Lebih dari itu,

---

<sup>50</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 32



terdapat berbagai tugas yang harus dipenuhi, baik segi kejiwaan, ruhaniah, kemasyarakatan yang harus menjadi tanggungjawabnya. Dari hal ini, tidak diperkenankan dalam memilih istri hanya terbatas dari segi fisik, dengan mengesampingkan sisi lainnya. Bahkan harus memelihara tujuan-tujuan secara keseluruhan dan menjamin pemenuhan atas tujuan tersebut. Kepuasan insting sungguh bisa tercukupi dengan kecantikan dan keindahan, namun tidak dapat mencukupi dalam pemuasan kerinduan ruh dan keinginan jiwa seperti ketenangan, cinta, dan keamanan.

Berkaitan dengan aturan memilih istri, Al-Qur'an telah banyak membicarakan dalam beberapa ayat, yaitu :

Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ  
وَلَوْ أَعَبَّ بَتُّكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ  
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ  
يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*

QS. At-Tahrim ayat 5

عَسَىٰ رَبُّهُٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبَدِّلَهُٓٓ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَنَّ مُسَلِّمَتٍ

مُّؤْمِنَتٍ قَنِيَّتٍ تَتَّبِعُ عِبَادَ سَيِّحَةٍ تَيَّبَتْ وَأَبْكَارًا ﴿٥﴾

Artinya: *Jika Nabi menceraikan kamu, boleh Jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan.*

Ayat-ayat ini menyebutkan semua sifat-sifat yang diinginkan dan diharapkan dalam membangun rumah tangga yang tenang, aman, kokoh, yang mampu membangkitkan sesuatu yang disandarkan padanya seperti tanggungjawab, dan mampu melaksanakan misinya di masyarakat. Sifat-sifat ini dengan arti lain yaitu taat dan patuh kepada Allah. Istri memiliki bagian ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Memelihara perintah-perintah agamanya, mudah mematuhi suaminya dan mengikuti perintahnya dalam semua hal kecuali suami memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maka tiada ketaatan diperbolehkan karena sesungguhnya tiadalah ketaatan kepada makhluk dalam mendurhakai sang *Khaliq*.

Istri memiliki sifat iman kepada Allah, yakni memenuhi hati dengan cahaya dan keyakinan. Imannya menjadi pokok ketaatan dan kepatuhan pada perintah Allah, mendorong amal perbuatan dan hati yang ridha, tenang, konsisten, tanpa ada rasa riya dan tidak menampilkan ketaatan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan istri dengan ketenangan hati dan berhubungan dengan keindahan dan kebaikan. Sifat berikutnya

adalah taubat, yaitu menyesali terhadap maksiat yang telah terjadi dan menuju ketaatan. Istri menghiasi diri dengan sifat ini, memungkinkan baginya untuk mendapatkan sesuatu yang telah luput darinya juga berbagai kebaikan jiwa dan indrawi bagi suaminya dan segenap anggota keluarga dan masyarakatnya.

b. Memilih Suami

Suami yang terpuji dalam pandangan Islam adalah yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan yang utama, sifat kejantanan yang sempurna, ia memandang kehidupan dengan benar, melangkah pada jalan yang lurus, ia bukanlah orang yang memiliki kekayaan, atau orang yang memiliki fisik yang baik dan kedudukan tinggi, dengan tanpa memberi pertolongan dengan memberikan anugerah dan unsur yang baik.<sup>51</sup>

c. Khitbah (Meminang)

Setiap akad yang disyariatkan Allah SWT memiliki kepentingan dan manfaat yang telah disebutkan diawal agar masing-masing orang yang berakad jelas keinginannya dan mencapai tujuan-tujuan dalam akad. Jika berbagai keinginan telah bertemu, masing-masing dari keduanya melakukan akad. Keinginan keduanya telah bertemu dengan mengucapkan *Ijabqabul* kemudian akad.\

Khitbah (meminang) merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah, ia merupakan langkah-langkah menuju pernikahan meskipun khitbah tidak berurutan dengan mengikuti ketentuan yang merupakan dasar dalam jalan penetapan, oleh karena itu seharusnya

---

<sup>51</sup> Musthafa Abdul Wahid, *Al-Usrah fi Al-Islam*, hlm. 26

dijelaskan dengan keinginan yang benar dan kerelaan penglihatan. Sungguh, Islam menjadikan khitbah sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang laki-laki menjadi tenang terhadapnya dengan orang yang diinginkannya sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan. Ia seorang yang menyenangkan untuk ketinggian istrinya secara indrawi dan maknawi sehingga tidak menyusahkan hidupnya dan mengeruhkan kehidupannya.<sup>52</sup>

#### d. Akad Pernikahan

Termasuk dari hakikat atas seorang muslim bahwa pernikahan merupakan ikatan yang kokoh, mengikatkan hati, dan melembutkannya, mencampurkan nasab, menumbuhkan hubungan kemsyarakatan, menjadikan kemashlahatan, sehingga manusia dapat menjaga hubungan antarindividu dan golongan. Dengan demikian, menjadi luas hubungan kemsyarakatan. Sungguh Allah SWT telah menjadikan hubungan kekeluargaan karena perkawinan menjadi dasar nasab, Allah berfirman dalam QS. Al-Furqan ayat 54 :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۚ وَكَانَ رَبُّكَ

قَدِيرًا

Artinya: *Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah<sup>53</sup> dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.<sup>54</sup>*

<sup>52</sup> Musthafa Abdul Wahid, *Al-Usrah fi Al-Islam*, hlm. 29

<sup>53</sup> Mushaharah artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya.

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Surabaya : Penerbit Fajar Mulya, t.th), hlm. 364

Dari sudut keinginan dan kepentingan ini dibentuk pernikahan. Hartanya termasuk kesucian dalam jiwa-jiwa, kedudukan dalam aturam kemasyarakatan. Oleh karena itu, Allah yang Maha Bijaksana meliputinya dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan hukum-hukum yang terperinci sejak permulaan pemikiran peminang hingga kesempurnaannya. Kemudian meliputi juga dengan setiap tanggungan-tanggungan yang bersifat materi dan maknawi sejak pelaksanaannya sehingga berakhirnya pernikahan sebab kematian atau yang lainnya untuk menjaga hak-hak semua pihak.<sup>55</sup>

e. Membangun Pilar Rumah Tangga

Jika peminangan telah selesai, akad telah dilaksanakan, tibalah malam perpindahan pengantin kerumah suaminya, maka Islam tidak melupakan suasana jiwa yang menguasai masing-masing suami istri. Suasana ini dipenuhi dengan perasaan kasih sayang, dan kepentingan-kepentingan. Maka ia berusaha untuk memenuhi suasana ini dengan suasana lain yang tersiar dengan kegembiraan dan kebahagiaan sehingga kehidupan keluarga menjadi jelas dalam permulaan, optimis serta diridhai. Termasuk sunnah dalam melaksanakan pesta untuk pengantin yang tercapai dengan memberitahukan pernikahan dan menyiarkannya. Tidaklah mengapa dalam pesta terdapat senda gurau yang tidak membicarakan kemungkaran. Tidak membawa kebatilan seperti dengan memukul rebana, atau suara nyanyian yang diperbolehkan.

---

<sup>55</sup> Muhammad Isma'il Ibrahim, *Az-Zawaj*, hlm. 106

Sebagaimana Islam menganjurkan bagi suami untuk mengadakan pesta (walimah), memberi makan keluarganya, teman-temannya, memberikan bagian untuk kaum fakir, dan orang-orang yang membutuhkan sebagai rasa syukur kepada Allah dan memberitahukan atas anugerah-Nya dan hal tersebut tidak membebaninya. Tidak dibebankan kepadanya melainkan memberikan sesuatu yang ia mampu. Sungguh, Rasulullah telah mengajarkan, ia mengadakan walimah sesuai kemampuannya dan ia tidak menambah dari seekor kambing. Anas berkata: “aku tidak melihat Nabi mengadakan walimah pada salah seorang istri-istrinya sebagaimana ia mengadakan walimah pada Zainab, adakanlah walimah dengan seekor kambing”.<sup>56</sup>

Dalam perkawinan disunnahkan berdoa bagi kedua mempelai. Memberikan ucapan selamat diperbolehkan dengan kata apapun, hanya saja bahwa berpegang pada hadis yang datang dari Nabi SAW mengandung kebaikan, keberkahan, dan juga menghidupkan syi'ar Islam.<sup>57</sup>

## 6. Tujuan Perkawinan

Setiap perkawinan mempunyai tujuan seperti yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan. Perkawinan yang tidak mempunyai tujuan seperti dimaksud dalam pasal ini, bukan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anak.

---

<sup>56</sup> HR Al-Bukhari dan Muslim

<sup>57</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga I*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 112



Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dan anak-anak dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman bersama.

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia/sejahtera. Bahagia artinya ada kerukunan yang menciptakan rasa tenteram, damai, dan saling menyayangi tanpa saling mencurigai. Sejahtera artinya cukup kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan hiburan yang diperoleh dari hasil pekerjaan (profesi) yang layak bagi kehidupan keluarga. suami/Istri boleh melaksanakan pekerjaan apa saja sebagai sumber kesejahteraan keluarga, asalkan tidak di larang dalam Undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat.

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Kekal artinya sekali perkawinan dilaksanakan, berlangsung terus tidak boleh diputuskan begitu saja. Perkawinan kekal tidak mengenal jangka waktu tertentu, tidak mengenal batas waktu, kecuali jika salah satu pihak meninggal dunia. Perkawinan yang dilangsungkan berdasar pada niat yang bersifat sementara disebut perkawinan kontrak. Perkawinan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak, tetapi sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab. Oleh karena itu perkawinan dilakukan secara berkeadaban pula, sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 2014), hlm. 85-86.

## B. Batas Usia Perkawinan

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas usia perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi keringanan bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an menginsyarkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu.

Firman Allah SWT :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak untuk (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*<sup>59</sup>

Kata (الصَّالِحِينَ) dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak

kawin” yakni yang mampi secara mental dan spriritual untuk Begitu pula dengan hadist Rasulullah SAW, yang menganjurkan membina rumah tangga.<sup>60</sup> kepada para pemuda untuk melangsungkan pecrkawinan dengan syarat adanya kemampuan.

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد  
الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة و الأسود على عبد الله فقال عبد الله

<sup>59</sup> QS. An-Nur: 32

<sup>60</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 335

كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحسن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء  
(رواه البخاري)

Artinya: Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari Al A'masy dia berkata: "telah menceritakan kepadaku dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: "ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: "wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu." (HR. Bukhari).

#### 1. Batas usia perkawinan dalam Al-Qur'an

Syariat Islam menunjukan kedewasaan seseorang melalui Al-Qur'an yakni ketika sudah baligh yang ditandai mimpi sehingga keluar mani bagi laki-laki dan ditandai keluar darah haid bagi perempuan. Sesuai dengan firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: *Dan ujilah<sup>61</sup> anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).<sup>62</sup>*

Batasan usia menikah telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yakni setelah anak itu memiliki kecapakan tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak tersebut dapat dipercayai. Dispensasi nikah dapat diberikan atas dasar pertimbangan kemashlahatan apabila terdapat motif yang benar-benar dapat diharapkan akan lebih dapat menyampaikan pada tujuan perkawinan.<sup>63</sup>

## 2. Batas Usia Perkawinan dalam Fiqh

Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan Hadist mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 tahun bagi pria, dan haid pada wanita minimal pada umu 9 (sembilan) tahun. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkannya seseorang untuk melangsungkan perkawinan.<sup>64</sup> Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikan dengan baligh.

<sup>61</sup> Yakni: Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.

<sup>62</sup> Q.S. An-Nisa : 6

<sup>63</sup> Ahmad Ahzar Basir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN, t.th), hlm. 23.

<sup>64</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), hlm. 394

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan usia bagi orang yang dianggap baligh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa :

و قال الشافعية و الحنابلة أن البلوغ بالسن يتحقق بخمس عشرة سنة في الغلام و الحارثة

Artinya: Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun.<sup>65</sup>

Ulama Hanafiyyah menetapkan usia seseorang dianggap baligh sebagai berikut:

و قال الحنفية ثمان عشرة في الغلام و سبع عشرة في الحارثة

Artinya: Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan.<sup>66</sup>

Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan :

و قال الإمامية خمس عشرة في الغلام و تسع في الحارثة

Artinya: Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 (sembilan) tahun bagi anak perempuan.<sup>67</sup>

Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat, pertama Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum baligh. Kedua, ia dianggap telah baligh karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak khiyar baginya sebagaimana yang dimiliki oleh wanita dewasa.

<sup>65</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *al Ahwal al Syakhsiyyah*, (Beirut: Dar al'Ilmi lil Malayain, t.th), hlm. 16

<sup>66</sup> Mughniyyah, *al Ahwal al Syakhsiyyah*, hlm. 16

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 16

Mengingat perkawinan merupakan akad atau perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) yang menuntut setiap orang yang terikat didalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan.<sup>68</sup> Perkawinan sebagai salah satu bentuk pembebanan hukum tidak cukup hanya dengan mensyaratkan baligh (cukup umur) saja. Pembebanan hukum (takhlif) didasarkan pada akal (aqil, *mumayyiz*), baligh (cukup umur), atau pemahaman. Maksudnya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik terhadap taklif yang ditujukan kepadanya.

Terkait dengan prinsip kedewasaan dalam perkawinan, para ulama cenderung tidak membahas batasan usia perkawinan secara rinci namun lebih banyak membahas tentang hukum mengawinkan anak yang masih kecil. Perkawinan anak yang masih kecil didalam fiqh disebut nikah *ash shaghir/shaghirah* atau *az-zawaj al mubakkir*. *Shaghir/shaghirah* secara literal berarti kecil. Akan tetapi yang dimaksud dengan *shaghir/shaghirah* adalah laki-laki atau perempuan yang belum baligh.<sup>69</sup>

Perkawinan dibawah umur tidak lepas dari hak ijbar yaitu hak wali (ayah/kakek) mengawinkan anak perempuannya tanpa harus mendapatkan persetujuan atau izin terlebih dahulu dari anak perempuan yang akan dikawinkan tersebut, asal saja ia bukan berstatus janda.

---

<sup>68</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan (Membina keluarga sakinah menurut Al-Qur'an dan As Sunnah)*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), hlm. 1

<sup>69</sup> Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta: LkiS, 2007), hlm. 90



### 3. Batas Usia Perkawinan dalam Perundang-undangan

Penentuan batas usia minimum untuk kawin dalam Pasal 7 UU Perkawinan, kalau ditarik garis lurus pada kebiasaan masyarakat adat yang gemar mengawinkan anak-anaknya yang masih belum matang, memang di tanah air ini kelihatan ada kemajuan yang cukup signifikan demi mengeliminasi perkawinan bocah yang masih gemar bermain. Batas usia minimum untuk kawin yang ditetapkan Pasal 7 UU Perkawinan ini dalam lingkungan masyarakat yang kritis, khususnya pembela gender, dirasakan masih ranum dengan permasalahan.

Beberapa pihak menginginkan batas usia minimum tersebut lebih ditingkatkan pada usia kedewasaan saat ini yang kian maju dalam pemikiran. Terutama untuk batasan minimum bagi wanita yang dirasakan masih rendah sehingga potensial akan memunculkan kendala berumah tangga. Memang batasan usia minimum untuk kawin yang diatur dalam UU Perkawinan ini setelah setengah abad sering mendapat kecaman, karena dirasakan banyak pihak dianggap terlalu dini. Penentuan bagi pria dan wanita yang tidak sama acap mendatangkan kerancuan.

Bagi pria ditetapkan 19 tahun berarti sudah lewat umur dewasa yaitu 18 tahun, tetapi untuk wanita malah 16 tahun ada di bawah ukuran batas dewasa. Perbedaan batas usia minimum untuk kawin bagi pria dan wanita yang tidak sama seperti itu, pada saat-saat tertentu akan mengundang persoalan. Memang akan lebih tepat kalau disamakan saja atau di atas ukuran usia dewasa. Memang sering terlihat aturan batas usia minimum untuk kawin ini kenyataannya bagi masyarakat modern yang selalu ingin memacu aspek pendidikan, umur 16 tahun dan 19 tahun tersebut dianggap

sanagat dini untuk melangsungkan sebuah perkawinan. pencapaian tingkat pendidikan setinggi yang dicita-citakan oleh kebanyakan generasi muda umumnya perkawinan yang ideal baru akan dilaksanakan setelah misalnya kalau mereka sudah memiliki penghasilan yang diraih akibat kelulusan dari pendidikan tinggi.

Efektifitas berlakunya Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan batas usia minimum untuk kawin 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria, bahwa kalau calon pengantin tidak mampu membuktikan usianya dengan akta kelahiran. Berdasarkan Pasal 6 ayat 2 huruf a PP No. 9/1975, ketiadaan akta kelahiran, dapat diganti dengan akta kenal lahir atau surat keterangan lahir dari kepala desa. Ukuran hidup di perdesaan, apalagi kalau tempatnya terpencil, surat keterangan lahir dari kepala desa biasanya tidak pernah jelas ukurannya. Akibatnya di kawasan masyarakat yang hidup jauh dari hingarbingarnya kota perkawinan anak-anak masih sering terjadi akibat calon mempelainya tak punya akta kelahiran. Merupakan suatu kemajuan kalau beberapa waktu yang lalu pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dimana untuk memperoleh akta kelahiran dan setiap keluarga yang mempunyai anak, relative mudah prosedurnya dan di beberapa kawasan oleh pemerintah daerahnya tidak dipungut biaya. UU Administrasi Kependudukan ini pada masa yang akan datang dapat benar-benar membantu meningkatkan efektivitas aturan batas usia minimum untuk kawin yang ada dalam Pasal 7 Undang-undang Perkawinan.

Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Perkawinan memungkinkan seseorang kawin pada usia kurang dari batas minimum yang sudah ditetapkan, dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan berdasarkan alasan tertentu. Apa alasan yang dimaksud, undang-undang sendiri tidak merinci namun hal itu diserahkan pada pertimbangan hakim yang sekiranya dianggap layak untuk ditetapkan adanya dispensasi yang diperlukan. Dispensasi yang dimaksud dapat diajukan selain kepada pengadilan juga dapat dimintakan kepada pejabat lain yang ditunjukan oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Siapa pejabat yang dimaksud, tidak ditetapkan, hanya dalam penjelasan diuraikan bahwa aturan tentang pengajuan dispensasi yang ada dalam BW dan HOCI dinyatakan tidak berlaku lagi. Aturan dispensasi dapat dimintakan kepada pejabat lain siapa yang dimaksud pejabat lain itu, tidak pernah ada keterangan yang tegas.

Aturan menyangkut dispensasi ini ada kalanya memang diperlukan akibat keadaan darurat yang menyimpang dari situasi dan kondisi normal. Soal dispensasi ini sebenarnya lebih layak dan proposional kalau permohonannya diajukan ke pengadilan, karena hakim setelah mengetahui alasan dan mendengar dari pihak keluarga, secara obyektif akan dapat memberikan penetapan yang diperlukan. Ini menjadi penting sebagai dasar yuridis bagi petugas yang akan melangsungkan perkawinan tersebut, mengingat peristiwa itu dilaksanakan karena dalam keadaan darurat, sementara kalau dispensasi itu diberikan oleh pejabat lain sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan yang tidak pernah jelas siapa pejabat yang dimaksud, justru akan mengakibatkan keracunan.

#### 4. Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Perdata

Perkawinan anak-anak pada beberapa dasawarsa yang lalu memang masih marak dilakukan oleh orangtua, khususnya di beberapa kawasan Nusantara akibat adat kebiasaan setempat. Anak-anak yang belum matang jiwa raganya, dijodohkan oleh orang tua, tanpa mereka itu tahu arti dan makna perkawinan yang dilakoninya. Pada peristiwa seperti itu, justru kehendak dan kepentingan orang tua dijadikan batu ukur, tanpa memperdulika kebutuhan anak yang masih terlalu muda untuk membangun keluarga. Berdasarkan pertimbangan medis, ada kalanya perkawinan anak-anak itu tidak sehat, baik ditinjau dari segi fisik ataupun mental yang bersangkutan, sehingga sering terjadi kegagalan dalam membina rumah tangga mereka. Terang saja peristiwa ini sedikit banyak akan merugikan tumbuh kembangnya sumber daya manusia yang unggul. Pendidikan yang mestinya harus dirintis, terhenti karena harus kawin atas dasar kehendak orang tua. Kelahiran yang dialami ibu-ibu yang kawin muda, sering kali mendatangkan mala petaka yang tidak diinginkan. Karena banyak segi negative yang muncul akibat perkawinan anak-anak.<sup>70</sup>

Guna meminimalisir maraknya perkawinan anak-anak, dalam Pasal 7 Undang-undang Perkawinan ditetapkan bahwa batas usia minimum untuk kawin bagi seorang anak perempuan adalah 16 (enam belas) tahun, sedang bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun. Aturan ini bila dibandingkan dengan Pasal 29 BW, yang faktanya dibuat satu setengah abad yang lalu, ternyata hanya terpaut sedikit, yakni masing-masing hanya 1 (satu) tahun. Rentang waktu kelahiran kedua aturan kawin tersebut, BW dan Undang-

---

<sup>70</sup> Moch Isnani, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 53

undang Perkawinan demikian jauh, tetapi perbedaan penentuan batas usia minimum untuk kawin sangat tipis. Menalar penentuan batas usia minimum untuk kawin seperti itu, banyak pihak akan mengenyitkan dahi didera keheranan yang menggajal. Sementara ada yang menganggap batas usia minimum untuk dapat kawin dalam UU Perkawinan, khususnya bagi wanita adalah terlalu muda. Memang apa yang ditetapkan UU Perkawinan adalah batas minimum, dan orang mau kawin di atas batas yang ditetapkan tidak dilarang. Meski demikian, kekhawatiran beberapa kalangan timbul disebabkan justru batas minimum akan dipergunakan oleh sebagian masyarakat sebagai sebuah perkenan yang sah, sehingga tepat pada batasan tersebut mereka akan mengawinkan anak-anaknya, khususnya wanita yang menurut ukuran medis ataupun jenjang pendidikan generasi muda, batas minimum tersebut dirasakan masih teramat tidak layak. Tak urung ada sekelompok masyarakat yang meminta batas usia minimum itu diubah karena dianggap tak sesuai dengan tuntutan zaman modern saat sekarang. Khususnya bagi kaum wanita, batas usia minimum untuk kawin 16 tahun, sangat tidak paralel dengan semangat mencerdaskan bangsa lewat pendidikan formal yang digalang oleh pemerintah masa kini.<sup>71</sup>

Menyimak pada pengaturan batas usia minimum untuk kawin sebagaimana ditetapkan pada pasal 29 BW, yakni 15 tahun bagi wanita dan 18 tahun untuk pria, kalau dibandingkan dengan batas usia dewasa pada Pasal 330 BW yang menetapkan 21 tahun sering dijumpukan. Perlu dipahami dengan seksama, bahwa batas usia dewasa 21 tahun adalah batas anggapan cakap untuk melakukan perbuatan hukum secara umum, dalam

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 54

hal ini berkaitan dengan soal bisnis. Perbuatan berbisnis yang mengandalkan logika untuk berhitung untung dan rugi, usia 21 tahun dianggap sudah layak untuk mampu menimbang apakah perbuatan hukum itu akan mendatangkan keuntungan apakah justru rugi. Kemampuan mengandalkan logika itulah yang dijadikan batu ukur guna memperhitungkan untung rugi, dan ini diyakini kalau seseorang itu sudah dewasa, yakni saat mencapai usia 21 tahun, dan ini berlaku baik untuk pria maupun wanita. Oleh sebab itulah, salah satu syarat sahnya membuat perjanjian adalah cakap seperti yang diatur oleh Pasal 1320 BW. Asumsinya seseorang itu cakap, kalau yang bersangkutan sudah dewasa, berarti sudah pandai berhitung untung dan rugi, dan itu ditetapkan kalau sudah berusia 21 tahun sebagaimana ditegaskan oleh pasal 330 BW, tanpa membedakan jenis kelamin.

Berbeda dengan perbuatan hukum kawin, bahwa yang bersangkutan saat hendak kawin, tidak melulu mengandalkan pada logika, justru emosi atau perasaan, yakni cinta menjadi tolak ukurnya. Oleh karena itu batasannya berbeda, yakni jauh lebih muda dan berbeda batasannya tergantung jenis kelaminnya, 15 tahun untuk wanita dan 18 tahun bagi pria. Konon batasan-batasan usia tersebut berkait dengan urusan hormon yang secara alamiah akan dialami oleh setiap orang. Tak kelak kalau pasangan yang hendak kawin, semisal calon pengantinnya yang wanita berumur 15 tahun dan prianya 18 tahun, berarti sudah cukup untuk melakukan perbuatan hukum kawin berdasar Pasal 29 BW, lalu sebelum kawin ternyata berkehendak akan membuat Perjanjian kawin, jelas untuk urusan membuat



perjanjian mereka berdua dianggap belum cakap sebagaimana diminta oleh Pasal 330 jo 1320 BW. Oleh sebab itu pembentuk undang-undang perlu menyediakan Pasal 151 BW yang mengatur soal kebutuhan perbatuan dalam membuat Perjanjian Kawinan yang akan dilakukan oleh pihak yang berwenang memberi izin kawin pasangan yang bersangkutan.<sup>72</sup>

Dengan menyimak paparan tersebut, sekiranya dapat membandingkan bedanya norma yang terkait soal batas usia untuk kawin dan batas usia dewasa. Keduanya merupakan bidang-bidang yang berlainan. Batas usia dewasa sebagaimana diatur pada Pasal 330 BW adalah terkait dengan masalah cakap untuk melakukan perbuatan hukum yang berurusan dengan kegiatan bisnis khususnya saat membingkainya dengan perjanjian. Beda halnya dengan perbuatan hukum kawin yang tidak mengandalkan urusan logika, tetapi dimotori oleh rasa, maka batasan minimumnya adalah 15 tahun bagi wanita dan 18 tahun untuk pria seperti yang diatur oleh Pasal 29 BW. Manakala dalam urusan cinta itu sudah dimasuki pertimbangan bisnis yakni untung rugi, untuk itu lalu diperlukan membuat perjanjian kawin, maka bagi calon mempelai ternyata belum berusia 21 tahun tetapi sudah cakap untuk kawin, diperlukan perbantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 151 BW. Begitulah BW menetapkan aturannya yang dapat ditilik dengan runtut. Tetapi menjadi agak berbeda kalau menyimak pengaturan yang tertera dalam UU Perkawinan, dan terkesan akan sedikit mendatangkan ganjalan, mengingat batas usia dewasa menciut relatif jauh yakni 18 tahun, bukan lagi 21 tahun seperti halnya BW.

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 55

### C. Anak dan Usia Dewasa

#### 1. Anak dalam Hukum Positif Indonesia

Ditinjau dari aspek yuridis “anak” di mata hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak dibawah pengawasan wali. Maka dengan bertitik tolak pada aspek tersebut, ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.

Berbicara mengenai anak, maka kita akan akrab dengan pernyataan bahwa anak adalah penerus bangsa. Pernyataan ini memberikan makna yang cukup mendalam. Seluruh perjalanan hidup manusia diawali saat lahir ke dunia dan pertama kali menjadi bagian masyarakat sebagai seorang anak, disaat yang sama pula ia akan terikat dengan berbagai norma-norma dan tanggung jawab yang hidup ditempat ia lahir, baik itu norma dan tanggungjawab bagi dirinya pribadi maupun sebagai bagian kedua dari *zoom politicon*. Sehingga nantinya seorang anak yang tumbuh dewasa secara langsung maupun tidak mengambil bagian-bagian tertentu dari dalam masyarakat. Hal inilah yang dapat disebut sebagai regenerasi kehidupan sosial. Melalui proses inilah mereka akan terwarnai cara berpikir dan kebiasaan-kebiasaan hidupnya sehingga dapat berfungsi dan berperan.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Wahyu MS, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm. 71

Tabel 1. Batas Usia dalam Hukum Positif di Indonesia<sup>74</sup>

No	Peraturan Perundang-undangan	Kemampuan untuk bertindak/ kecakapan	Kedewasaan	Keterangan
1	Hukum Perdata/BW	Umur 21 Tahun atau sudah menikah	Umur tahun 21	Pasal 330 BW (Penafsiran secara logika terbalik)
2	Hukum Adat	Telah kuat bekerja	Kuat bekerja	Tidak secara tegas mengatur umur berapa seseorang dikatakan dewasa yang penting mampu dalam melakukan perbuatan hukum, seperti memenuhi kebutuhan sendiri.
3	Hukum Islam	<i>Baligh</i> , terjadi pada usia 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan	Mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan	Batasan usia tersebut bersifat relatif tergantung pada kematangan emosi dari individu yang bersangkutan
4	UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Umur 13-15 dapat bekerja dengan pembatasan atau syarat (Pasal 69)	>18 tahun (penafsiran secara logika terbalik pada Pasal 1 angka 26)	Undang-undang ini tidak secara tegas mengatakan kedewasaan diawali pada umur berapa, termasuk kemampuan untuk bekerja.
5	UU Nomor 7 Tahun 1948 tentang DPR	18 Tahun (Pasal 3 ayat 1 huruf b)	-	Tidak secara tegas menyatakan kedewasaan, namun hanya mengatur kewenangan untuk bertindak
6	UU Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Angkatan DPR	18 Tahun atau sudah kawin (Pasal 1 ayat 1)	-	Tidak secara tegas dinyatakan

<sup>74</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 3

7	UU Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara RI	Pasal 8: Umur 18 Tahun; Pasal 9: Wajib militer bagi yang berumur 18-40 tahun	-	-
8	UU Nomor 19 tahun 1955 tentang Pemilihan Anggota DPR	18 tahun atau sudah kawin (Pasal 2)	-	-
9	UU Nomor 66 Tahun 1958 tentang Wajib Militer	18 Tahun atau sudah kawin (Pasal 2 ayat 1)	-	-
10	UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Perempuan 16 tahun, laki-laki 19 tahun (Pasal 7 ayat 1)	-	Ketentuan tersebut hanya mengatakan minimal untuk menikah bukan kedewasaan
11	UU Nomor 9 Tahun 1964 tentang Gerakan Sukarelawan Indonesia	18 Tahun (Pasal 2)	-	-
12	UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	-	18 Tahun (Pasal 1 angka 5)	Ditafsirkan secara logika terbalik dari pengertian anak, namun demikian batas umur dewasa tidak secara tegas dinyatakan
13	UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	-	18 Tahun (Pasal 1 ayat 1)	Ditafsirkan secara logika terbalik dari pengertian anak, namun demikian batas umur dewasa tidak secara tegas dinyatakan
14	UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	-	Kurang lebih 18 Tahun (Pasal 1 angka 5)	Ditafsirkan secara logika terbalik dari pengertian anak, namun demikian batas umur dewasa tidak secara tegas dinyatakan
15	UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai	17 tahun atau sudah pernah kawin (Pasal 14)	-	Menyatakan diperbolehkannya menjadi anggota suatu

	Politik			partai politik, namun tidak menyatakan bahwa itu otomatis dewasa
16	UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD	17 tahun atau sudah pernah kawin	-	Menyatakan diperbolehkannya untuk memilih dalam pemilu suatu partai politik namun tidak dinyatakan bahwa itu otomatis dewasa
17	UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	18 Tahun atau sudah menikah (Pasal 39 ayat 1)	-	Ketentuan tersebut dikenakan bagi penghadap. Dalam Pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a) Paling sedikit berusia 18 Tahun dan telah menikah b) Cakap melakukan perbuatan hukum
18	UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	Berumur >27 Tahun (Pasal 3 huruf C) maka dengan memenuhi persyaratan yang termuat dalam pasal 3 ini, notaris memiliki kewenangan sebagaimana dimuat dalam pengertian notaris Pasal 1 angka 1. Kewenangan notaris lebih lanjut diatur dalam Pasal 15 ayat 1,2, dan 3	-	Ketentuan tersebut dikenakan sebagai syarat menjadi pejabat notaris

## 2. Usia Dewasa

### a. Dewasa secara yuridis

Masalah kedewasaan muncul setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena Undang-undang ini tidak hanya mengatur mengenai perkawinan namun mengenai pengaturan dasar hukum keluarga. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini memberi batasan tentang usia dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun hal mana tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) dan pada Pasal 50.<sup>75</sup> Perbedaan pendapat diantara para ahli hukum tentang batas usia dewasa, disebabkan adanya berbagai pengaturan yang menyebut suatu batas usia untuk hal tertentu. Sebagaimana pula dipertajam oleh dasar pandangan dan penafsiran yang berbeda, karena itu perlu ditelaah secara mendalam peraturan mana yang dapat atau lebih tepat untuk dijadikan pegangan secara yuridis dalam menentukan kedewasaan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) dan Pasal 50 telah mengatur tentang kedewasaan, sebagaimana juga KUHPdata/BW mengatur batas usia dewasa dalam Bab tentang Hukum Keluarga, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga telah menentukan batas usia dewasa tersebut. Pasal 47 menegaskan bahwa :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
- 2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

---

<sup>75</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 136



Pasal 50 menegaskan bahwa :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua berada dibawah kekuasaan wali.
- 2) Perwalian itu mengenai kepribadian anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.<sup>76</sup>

Setelah membaca dan menyimak isi dari isi Pasal tersebut, dapat diartikan bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun tanpa diwakili orangtua atau walinya dapat dibatalkan. Dengan jelas dan tegas peraturan ini mengatur perbuatan hukum seorang anak belum dewasa. Isi Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur tentang perbuatan hukum seorang anak belum dewasa, karena ia dalam setiap kegiatan hukumnya tidak dapat melakukannya sendiri melainkan harus selalu diwakili oleh orangtua maupun walinya. Dari penjelasan singkat dewasa secara yuridis ini dapat diambil satu garis besar bahwa seseorang dapat dianggap dewasa menurut hukum apabila memenuhi kriteria yang ada dan jelas dalam Undang-undang tersebut. Kriteria tersebut ditetapkan agar setiap subyek hukum dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukannya. Dalam hal perkawinan ia diharapkan mampu memenuhi persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>77</sup> HM Ghufroon, *Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan (Analisis Pembatasan Usia Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, hlm. 15

b. Dewasa secara Sosiologis

Mempertimbangkan realitas masyarakat Indonesia yang hidup dengan watak yang religius, maka untuk tetap menjaga sakralitas perkawinan, pertimbangan-pertimbangan hukum yang berasal dari ajaran agama patut digunakan dalam memberlakukan ketentuan usia perkawinan sebagaimana yang telah termaksud dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pemikiran yang mendasari pertimbangan ini adalah teori hukum yang dirumuskan oleh aliran *Sociological Jurisprudence* yang memberikan perhatian sama pentingnya kepada faktor-faktor penciptaan dan pemberlakuan hukum yaitu masyarakat dan hukum. Pada umumnya masyarakat adat memandang seseorang dianggap telah dewasa jika telah mampu memelihara kepentingannya sendiri. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh beberapa pakar hukum adat antara lain :

- 1) Ter Haar, dewasa adalah cakap (*volwassen*) sudah kawin dan hidup terpisah meninggalkan orangtuanya.
- 2) Soepomo, dewasa adalah kuat gawe cakap mengurus harta keperluannya sendiri.
- 3) Djojodigono, dewasa adalah secara lahir, mental, kuat gawe, mencar.

Kedewasaan menurut pandangan adat memang terlepas dari patokan umur, sehingga tidak ada keseragaman mengenai kapan seseorang dapat mulai dikatakan dewasa, ukuran dewasa tergantung pada masing-masing individu walaupun sebenarnya tetap memiliki pertautan dengan pengertian dewasa menurut Ilmu Psikologi dimana kedewasaan

merupakan suatu fase pada kehidupan manusia yang menggambarkan telah tercapainya keseimbangan mental dan pola pikir dalam setiap perkataan dan perbuatan. Seseorang yang telah mampu bekerja untuk mencari penghidupan, maka sesungguhnya secara pribadi dia telah mampu berfikir dan bertanggungjawab atas kebutuhan hidupnya, walaupun proses pendewasaan dini dalam masyarakat tidak termasuk dalam kategori tersebut.

Menurut Harsanto Nursadi kedewasaan menurut konsep adat didasarkan pada :

- 1) Penilaian masyarakat menyatakan demikian.
- 2) Kemampuan berburu dan mencari makan.
- 3) Kemampuan memimpin teman-temannya.
- 4) Melihat kondisi fisik seseorang.

Berdasarkan hal tersebut, baik pertimbangan yang dikemukakan maupun aspek adat yang mungkin mempengaruhi adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama dalam hal batas usia perkawinan, memang tidak ada ketentuan ,husus yang definitif terkait kedewasaan dalam usia perkawinan. Meskipun demikian, dengan adanya batasan usia dalam melaksanakan perkawinan secara sosial maksud pembatasan usia tersebut agar para pihak atau mempelai memahami seutuhnya tanggungjawab sosial yaitu kemampuan membimbing keluarga pada kebaikan dan tanggungjawab terhadap

masyarakat secara luas dengan memelihara ketentraman melalui rumah tangga.<sup>78</sup>

### 3. Pandangan Psikologis dan Sosiologis tentang Usia Dewasa

#### a. Pandangan secara Psikologis

Apabila dilihat dari segi psikologis usia perkawinan yang ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan umumnya sudah matang, pada usia tersebut seseorang sudah bisa membuahkan keturunan. Pada masa ini tanda bahwa alat untuk mereproduksi keturunan telah berfungsi, akan tetapi bila dilihat dari segi psikologis sebenarnya pada anak wanita usia 16 (enam belas) tahun belum bisa dikatakan bahwa anak tersebut sudah dewasa secara psikologis. Demikian juga pada pria dengan usia 19 (sembilan belas) tahun belum bisa dikatakan matang secara psikologis pada usia tersebut biasanya masih digolongkan sebagai remaja. Menurut Hurlock bahwa seseorang bisa dikatakan dewasa apabila sudah mencapai 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi laki-laki.<sup>79</sup>

#### b. Pandangan secara Biologis

Adapun ciri-ciri kedewasaan seseorang secara biologis menurut para ulama ahli fiqh sepakat dalam menentukan *taklif* (dewasa dari segi fisik, yaitu seseorang sudah dikatakan baligh) ketika sudah keluar mani bagi laki-laki, dan sudah haid bagi perempuan. Apabila tanda-tanda itu dijumpai pada seorang laki-laki ataupun seorang perempuan maka para fuqaha sepakat menjadikan umur sebagai suatu ukuran, akan tetapi

<sup>78</sup> HM Ghufon, *Makna Kedewasaan*, hlm. 17

<sup>79</sup> Elizabeth B Hurlock, *Psikologi Perkembangan suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 1994), hlm. 226

mereka berselisih faham mengenai batas-batas seseorang yang telah dianggap dewasa. Akan tetapi berdasarkan ilmu pengetahuan kedewasaan seseorang tersebut akan dipengaruhi oleh keadaan zaman dan daerah dimana ia berada.<sup>80</sup>



---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 226

### **BAB III**

#### **LAPORAN PENELITIAN**

##### **A. Tinjauan tentang Mahkamah Konstitusi**

###### **1. Pengertian Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga Negara yang berwenang untuk melakukan hak pengujian (*judicial review* atau secara lebih spesifiknya melakukan *constitutional review*) Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar serta tugas khusus lain yaitu forum privilegium atau peradilan yang khusus untuk memutus pendapat DPR bahwa Presiden telah melanggar hal-hal tertentu yang disebutkan dalam UUD sehingga dapat diberhentikan.<sup>81</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya.<sup>82</sup> Sebagai sebuah lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dalam mengawal dan menjamin terlaksananya prinsip-prinsip dan norma yang terkandung dalam konstitusi sebagai norma tertinggi penyelenggaraan hidup bernegara (*the supreme law of the land*). Karena itu, Mahkamah Konstitusi disebut juga sebagai *the guardian of the constitution*.

---

<sup>81</sup> Moh. Mahfud, *Perdebatan hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 118

<sup>82</sup> Pasal 24 ayat (2) UUD 1945



Adapun kewajiban Mahkamah Konstitusi yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-undang Dasar.<sup>83</sup>

Pembentukan Mahkamah Konstitusi menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Beberapa wilayah yang tadinya tidak tersentuh oleh hukum seperti masalah *judicial review* terhadap Undang-undang sekarang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk juga kewenangan-kewenangan lainnya yang diatur dalam UUD 1945 pasca amandemen. Disamping itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga harus dilengkapi dengan susunan organisasi yang jelas, hukum acara yang memadai, asas-asas hukum dan sumber hukum yang dijadikan acuan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya. Munculnya Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan menjadi *entry point* yang mendorong terwujudnya sistem kekuasaan kehakiman yang modern di Indonesia.<sup>84</sup>

## 2. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai *special tribunal* secara terpisah dari Mahkamah Agung, yang mengemban tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern, yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Sejarah modern *judicial review* yang merupakan ciri utama kewenangan Mahkamah Konstitusi di

<sup>83</sup> Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945

<sup>84</sup> Bambang Sutyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2009) hlm. 1

Amerika Serikat oleh Mahkamah Agung dapat dilihat sebagai perkembangan yang berlangsung selama 250 tahun dengan rasa kebencian sampai dengan penerimaan yang luas.

Setelah perang dunia kedua, gagasan Mahkamah Konstitusi dengan *judicial review* menyebar luas ke seluruh Eropa, dengan mendirikan Mahkamah Konstitusi secara terpisah dari Mahkamah Agung. Akan tetapi, Perancis mengadopsi konsepsi ini secara berbeda dengan membentuk *constitutional council (conseil constitutionnel)*. Negara-negara bekas jajahan Perancis mengikuti pola Perancis ini. Ketika Uni Soviet runtuh, bekas negara-negara komunis di Eropa Timur semuanya mereformasi negerinya, dan negara otoriter menjadi negara demokrasi konstitusional yang liberal. Konstitusi segera di revisi dan dalam proses itu satu lembaga baru dibentuk, yaitu satu mahkamah yang terdiri atas pejabat-pejabat kekuasaan kehakiman dengan kewenangan untuk membatalkan undang-undang dan peraturan lain jika ternyata ditemukan bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang lebih tinggi, yaitu Konstitusi.

Sampai sekarang sudah 78 negara yang mengadopsi sistem Mahkamah Konstitusi yang didirikan terpisah dari Mahkamah Agungnya dan Indonesia meruoakan negara yang ke-78, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Undang-undang Mahkamah Konstitusi) pada tanggal 13 Agustus 2003,

yang telah berlaku secara operasional sejak pengucapan sumpah 9 (sembilan) hakim konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2003.<sup>85</sup>

### 3. Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Fungsi dan peran utama Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstiusionalitas hukum. Demikian halnya yang melandasi negara-negara yang mengakomodir pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab Undnag-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi. Bahkan, ini juga terjadi di negara-negara lain yang sebelumnya menganut sistem suoremasi parlemen dan kemudian berubah menjadi negara demokrasi. Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstiusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal.

Pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2) menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga

---

<sup>85</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 3

Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

- b. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut Undang-undang Dasar.

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945.
- c. Memutus pembubaran partai politik.
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/ atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar merupakan tugas yang mendominasi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana

tampak dari permohonan yang masuk dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah konstitusi. Lembaga pengujian ini telah mengalami sejarah yang panjang dan memperoleh bentuk serta substansi yang jelas setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat dibawah pimpinan Jhon Marshall memeriksa dan memutus perkara William Marbury yang pada saat-saat akhir pemerintahan Presiden Thomas Jefferson diangkat sebagai hakim tetapi surat keputusan tidak diserahkan oleh pemerintah baru kepadanya.<sup>86</sup>

Dalam praktik, dikenal adanya tiga macam norma hukum yang dapat diuji atau yang biasa disebut sebagai *norm control mechanism*. Ketiganya sama-sama merupakan bentuk norma hukum sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu:

- a. Keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (*regeling*).
- b. Keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan administratif (*beschikking*).
- c. Keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman (*judgment*) yang biasa disebut vonis.

Ketiga bentuk norma hukum diatas sama-sama dapat diuji kebenarannya melalui mekanisme peradilan (*justisial*) atau mekanisme *non-justisial*. Jika pengujian itu dilakukan oleh lembaga peradilan, maka proses pengujiannya itu dilakukan oleh lembaga peradilan, maka proses pengujiannya itu disebut sebagai *judicial review* atau pengujian oleh lembaga judicial atau pengadilan. Akan tetapi, jika pengujian itu dilakukan

---

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 11

bukan oleh lembaga peradilan, maka hal itu tidak dapat disebut sebagai *judicial review*.<sup>87</sup>

#### 4. Asas-Asas Mahkamah Konstitusi

Asas hukum (*Rechts Beginsellen*) merupakan pokok pikiran umum yang menjadi latar belakang dari peraturan hukum yang konkret (hukum positif).<sup>88</sup> Asas hukum bukanlah kaidah hukum yang konkret, melainkan latar belakang dari peraturan yang konkret dan bersifat umum atau abstrak. Untuk menemukan asas hukum dicarilah sifat-sifat umum dalam kaedah atau peraturan yang konkret.

Asas hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum umum yaitu asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, sedangkan asas hukum khusus merupakan asas hukum yang berlaku dalam bidang hukum yang lebih sempit, seperti bidang hukum pidana, perdata dan sebagainya. Beberapa asas hukum acara Mahkamah Konstitusi yang penting diantaranya adalah :

- a. Asas Independensi/Noninterferentif.
- b. Asas Praduga *Rechmatige*.
- c. Asas Sidang Terbuka untuk Umum.
- d. Asas Hakim Majelis.
- e. Asas Objektivitas.
- f. Asas Keaktifan Hakim Konstitusi (*dominus litis*).
- g. Asas Pembuktian Bebas.

---

<sup>87</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1

<sup>88</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 32



- h. Asas Putusan berkekuatan hukum tetap dan bersifat final.
- i. Asas Putusan mengikat secara “Erga Omnes”
- j. Asas Sosialisasi.
- k. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Biaya Ringan.<sup>89</sup>

## **B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014**

### **1. Duduk Perkara**

Bahwasannya perkawinan anak masih marak terjadi di Indonesia, faktor ekonomi masih merupakan alasan utama orangtua menikahkan anaknya. Hal ini yang turut mempengaruhi antarlain faktor sosial budaya, seperti kebiasaan orangtua menjodohkan anaknya saat mereka masih kecil, dan penilaian masyarakat yang negatif terhadap perempuan yang menikah diatas usia 18 tahun. Berdasarkan Survei Data Kependudukan Indonesia (SDKI) 2007 menunjukan 22% perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, dibeberapa daerah didapatkan bahwa sepertiga dari jumlah pernikahan terdata dilakukan oleh pasangan usia dibawah 16 (enam belas) tahun. Untuk itu para pemohon mengajukan uji materil terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Dan menurut pemohon ayat

---

<sup>89</sup> Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 18

tersebut bertentangan dengan UUD tahun 1945 dan akan merugikan hak warga negara khususnya perempuan.

Dalam Hukum Mahkamah Konstitusi batas pengajuan suatu putusan adalah 6 (enam) bulan. Maka Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa pertimbangan dalam memutus perkara tersebut. Setelah Mahkamah Konstitusi mendapat laporan (surat permohonan) uji materi, maka mahkamah konstitusi melakukan pemeriksaan secara mendalam kebenaran yang sebenar-benarnya sesuai dengan pihak-pihak yang telah diatur dalam Undang-undang. Selanjutnya mahkamah konstitusi akan melakukan penelitian dan pemeriksaan sebagaimana pertimbangan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Adapun para pemohon, yaitu :

- a. Zumrotin, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan.
- b. Indry Oktaviani, Direktur Organisasi Semerlak Cerlang Nusantara (SCN).
- c. Fr. Yohana Tantria W, Koordinator Eksekutif Masyarakat Untuk Keadilan Gender dan Antar Generasi (MAGENTA).
- d. Dini Anitasari Sa'baniah, Associate pada Organisasi SCN
- e. Hidayatut Thoyyibah, Staf Sistem Manajemen Informasi pada Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).
- f. Ramadhaniati, Staf pada Organisasi KPI
- g. Agus Hartono, Ketua Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA).
- h. Dian Kartika Sari, Sekretariat Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia.

Menimbang bahwa pemohon I telah mengajukan permohonan bertanggal 5 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 Maret 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 74/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi perkara Konstitusi dengan Nomor 30/PUU-XII/2014 pada tanggal 13 Maret 2014, yang telah diperbaiki dengan menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Kewenangan Mahkamah Konstitusi :

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”<sup>90</sup>
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat 1 UUD 1945, Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang-undang Mahkamah Konstitusi) Pasal 29 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 48 Tahun

---

<sup>90</sup> <http://www.Diktori/Putusan-Perkara-Nomor.30-74/PUU-XII/2014>

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946.

- c. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal Konstitusi (the guardian of the constitution). Apabila terdapat Undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi, mahkamah dapat menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum memikat baik sebagian maupun seluruhnya.
- d. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap pasal-pasal dalam undang-undang agar tidak bertentangan dengan konstitusi. Tafsir mahkamah terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpretation of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum.

Dengan demikian terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.

## 2. Alasan-alasan Pemohon Mengajukan Uji Materi Undang-undang Perkawinan

Pemohon merupakan pihak-pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan Undang-undang Perkawinan terutama dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2).

Hak konstitusional pemohon yang telah dilanggar dan dirugikan tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28C ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28G ayat (1) Undang-undang dasar 1945, Pasal 28H ayat (1) dan (2), dan Pasal 28I ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, maka pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahannya.

Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28A Undang-undang Dasar 1945 tersebut, menyatakan *“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan untuk hidup dan kehidupannya”*, Pasal 28B ayat (1) dan (2) menyatakan *“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; (2) “Setiap anak berhak atas kelangsung hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*, Pasal 28C ayat (1) menyatakan *“Setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*, Pasal 28D ayat (1) menyatakan *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum”*. Pasal 28G ayat (1) menyatakan *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah*

*kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, Pasal 28H ayat (1) dan (2) menyatakan “(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, (2) “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesamaan dan keadilan”, Pasal 28I ayat (1) dan (2) menyatakan “(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan hati dan nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; (2) “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif itu”.*

Norma konstitusi yang timbul dari Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (1), pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (2), dan Pasal 28I ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945 menimbulkan ketidakpastian, ketidakserasian, ketidakseimbangan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan.



Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut dan bukti-bukti terlampir maka dengan ini pemohon memohon ke Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materi pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945, Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pasal 28H ayat (1) dan (2), dan Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945;
- c. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya, atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan Putusan yang seadil-adilnya.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka pemohon juga telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberikan tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6. Selain itu, para pemohon juga mengajukan sembilan ahli dan satu orang saksi yaitu dr.Julianto Wijatsono, dr.Kartono Mohamad, Saparini Sadli, Roichatul Aswidah Rasyid, Yuniyanti Chuzaifah, Maria Ulfah Anshor, Muhadjir Darwin, Ninuk Pambudi, Muhammad Quraissy Shihab yg masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan hari Kamis, tanggal 4 September 2014; Senin, 29 September 2014; Kamis, 26 Oktober 2014; Kamis, 30 Oktober 2014; dan

Selasa 14 November 2014. Singkatnya Pemohon, ketentuan a quo telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum serta menciptakan perlakuan yang bersifat deskriminatif, karena itu menurut para Pemohon ketentuan a quo dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (2) dan Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945.

### 3. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi

Terhadap dalil para pemohon yang menyatakan bahwa berlakunya ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan telah menghalang-halangi pelaksanaan hak konstitusional untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah, hak anak dalam pernikahan, dan kepastian hukum atas status pernikahannya sebagaimana diatur Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (2), dan Pasal 28I ayat (1) dan (2) Undang-undang 1945 telah dirugikan.

Pasal 28A Undang-undang Dasar 1945 menyatakan :

*“Setiap orang berhak atas hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.*

Ketentuan Undang-undang Dasar 1945 ini melahirkan norma konstitusi bahwa pemohon yang merupakan warga Negara Indonesia memiliki hak dan setara dengan warga Negara Indonesia lainnya dalam

membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum.

Pasal 28B ayat (1) dan (2) menyatakan :

*“(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*

Ketentuan UUD 1945 ini jelas melahirkan konstitusi bahwa anak Pemohon juga memiliki ilmu pengetahuan dan kesejahteraan hidup umat manusia serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 28D UUD 1945 menyatakan :

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.*

Ketentuan UUD 1945 ini melahirkan konstitusi bahwa pemohon juga merupakan warga Negara Indonesia memiliki hak asasi manusia.

Pasal 28G UUD 1945 menyatakan :

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”.*

Ketentuan UUD 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak pemohon juga memiliki kesejahteraan tempat tinggal dan mendapatkan keadilan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28H ayat (1) dan (2) menyatakan :

(1) *”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; (2) “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.*

Ketentuan UUD 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa Pemohon juga memiliki hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar surut dihadapan hukum.

Pasal 28I ayat (1) dan (2) menyatakan :

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; (2) “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.*

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon a quo adalah untuk menguji pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya

disebut UU 1/1974 terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945).

Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UUMK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009). Permohonan para pemohon adalah untuk menguji konstiusionalitas Norma Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undangundangr Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terhadap UUD1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah Berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

a. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasanya, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undangundang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang

menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-undang yaitu :

- 1) Perorangan warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- 2) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang;
- 3) Badan hukum public atau privat; atau
- 4) Lembaga Negara;

Dengan demikian, para pemohon dalam pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu :

- 1) Kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi;
- 2) Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraph diatas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut :

Pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga Negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu : Pasal 28A menyatakan, “Setiap orang berhak untuk



hidup serta hidup berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Pasal 28B ayat (1) dan (2) menyatakan, (1) “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; (2) “Setiap anak berhak mendapatkan kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 28C ayat (1) menyatakan, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh mendapatkan ilmu pengetahuan teknologi, agama, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Pasal 28D ayat (1) menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 28G ayat (1) menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (1) dan (2) menyatakan, (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan; (2) “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Pasal 28I ayat (1) dan (2) menyatakan, (1) “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak

kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; (2) “Setiap orang berhak atas bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”; Hak konstitusional tersebut telah merugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Kalau memperhatikan akibat yang dialami oleh Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, maka terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo.

#### 4. Amar Putusan

Amar putusan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang Review Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan mengadili dan menyatakan :

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
- b. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur

19 (sembiliah belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.” Bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.

- c. Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan,”Dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”. Tidak memiliki hukum yang mengikat dan dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum, sehingga ayat tersebut harus dibaca.
- d. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- e. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

### **C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014**

Berdasarkan hasil wawancara dengan majelis hakim pengadilan agama kelas 1A tanjung karang mengenai Putusan MK Nomor 30-74/PUU/2014, bahwa batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sangat tepat, bersamaan dengan putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang menolak *Judicial Review* agar dinaikannya batas usia perkawinan bagi anak perempuan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwasannya usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 Tahun dan bagi laki-laki adalah 19 Tahun, dan kasus yang terjadi saat ini pada usia perkawinan yang telah ditetapkan masih terdapat banyak permohonan dispensasi.

Adapun relevansinya batas usia yang telah ditetapkan dalam era saat ini adalah dapat menanggulangi banyaknya permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan kepada pihak pengadilan agama, dalam masyarakat batas usia perkawinan pada saat ini dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang sangat setuju dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014.

Batas usia dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan beberapa Undang-undang lainnya yang menetapkan batas usia dewasa pada laki-laki dan perempuan, namun hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang mengaitkan permasalahan dengan beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia dan beberapa hal mendasar dalam hukum Islam seperti Maqasid Syariah dan *Urf* (tradisi). Maqasid Syari'ah sebagai tujuan diadakannya syari'at dalam Islam dikaitkan dengan tujuan Undang-undang yang harus melindungi manusia, *Urf* dipertimbangkan untuk melihat hukum dari adat atau tradisi sebagai hukum yang melekat kuat ditengah masyarakat.

Perbedaan usia dewasa yang terdapat dalam beberapa Undang-undang di Indonesia bukan berarti dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena penetapan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan psikis maupun biologis yang

menyesuaikan ketepatan dalam kebutuhan sebagaimana yang telah tertulis dalam Undang-undang.



## **BAB IV**

### **ANALISA DATA**

#### **A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Menolak Permohonan tersebut serta Relevansinya Batas Usia Perkawinan tersebut Pada Era Sekarang**

Dalam menyelesaikan suatu perkara, hakim akan memutuskan dengan memperhatikan apa yang dituntut dan putusan tidak boleh melebihi apa yang dituntut dengan pertimbangan yang memperhatikan keadilan manfaat dan kepastian maka fungsi peradilan dalam menggali hukum hidup akan dapat diwujudkan. Tentunya dengan memperlihatkan Undang-undang yang ada dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara yang diajukan. Disamping itu, masih diperlukan tafsiran dari pengertian agar pemahaman batasan minimal usia pernikahan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami dengan baik.

Alasan pemohon mengajukan uji materi Pasal 7 ayat (1) dan (2) adalah:

##### **1. Menimbulkan Ketidakpastian Hukum**

Banyaknya terjadi ketidakpastian hukum yang terjadi di Indonesia tentang ketentuan syarat umur seseorang untuk melangsungkan pernikahan, karena banyaknya sumber sumber ketentuan atau aturan yang berbeda tentang aturan syarat seseorang melangsungkan pernikahan.

##### **2. Melahirkan Banyaknya Praktik Perkawinan Anak Usia Dini**

Bahwa perkawinan anak, atau sering disebut dengan pernikahan dini banyak terjadi pada masyarakat Indonesia terutama masyarakat yang tinggal

di daerah pedesaan. Pada umumnya masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan masih banyak yang melakukan pernikahan dini, adapun beberapa alasan mereka melakukan pernikahan dini, pada umumnya pernikahan dini di daerah pedesaan terjadi karena adanya orang tua yang melakukan perjodohan anak- anaknya walaupun anak tersebut belum cukup umur untuk mrlangsungkan pernikahan, namaun masyarakat desa belum menyadari tentang masalah yang timbul jika terjadi pernikahan anak usia dini. Factor ekonomi juga termasuk faktor yang sering menjadi alasan masyarakat di daerah pedesaan melakukan pernikahan usia dini.

### 3. Mengancam kesehatan reproduksi perempuan

Kesehatan organ reproduksi anak perempuan bisa terganggu akibat adanya pernikahan di usia dini. Banyak penyakit penyakit yang mengancam serta membahayakan anak perempuan yang melakukan pernikahan usia dini karena faktor organ reproduksi anak perempuan yang sebenarnya belum siap atau layak untuk melakukan hubungan seksual.

### 4. Mengancam hak anak atas Pendidikan

Hak pendidikan anak bisa terancam apabila anak yang masih berusia dini dan seharusnya masih berkewajiban serta memiliki hak untuk belajar dapat terancam tidak mendapatkan haknya tersebut karena pernikahan usia dini. Karena pada dasarnya anak yang telah melakukan pernikahan sibuk dengan urusan dalam rumah tangganya seperti mengurus anak dan suami, itu mengakibatkan tidak adanya atau hilangnya rasa untuk belajar serta



meneruskan pendidikannya karena ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam hal keluarga.

5. Terjadinya diskriminasi pemenuhan hak antara anak laki-laki dan perempuan

Deskriminasi terjadi karena adanya ketidak setaraan jender dalam pernikahan, anak perempuan memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyuarakan pendapat. Dominasi pasangan menyebabkan rentan terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Alasan hakim Mahkamah Konstitusi dalam menolak permohonan uji materi Pasal 7 ayat (1) dan (2) yaitu:

Pertama, Mahkamah Konstitusi menganut perbedaan pengaturan yang berbeda tentang masalah usia perkawinan baik dalam masing-masing agama maupun perbedaan budaya. Mahkamah Konstitusi juga menganut negara-negara lain yang masih belum menaikkan batas usia perkawinan anak perempuan. Menurut Mahkamah Konstitusi, berdasarkan asas perkawinan, tidak pula dikenal batasan umur perkawinan demi mencegah dorongan birahi untuk itu dorongan birahi semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah berdasarkan ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak diluar perkawinan atau anak haram. Dengan kata lain Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa batas usia tidak perlu direvisi demi menghindarkan kelahiran anak diluar perkawinan.

Kedua, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan dianggap

sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk UU, dengan memperhatikan kondisi saat itu di tahun 1974. Namun terkait norma yang mengatur batasan usia, pengaturan batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Mahkamah Konstitusi merekomendasikan proses *legislative review* yang berada pada ranah pembentuk Undang-undang untuk menentukan batas usia yang ideal bagi perempuan untuk kawin.

Ketiga, menurut Mahkamah Konstitusi semua masalah terkait akibat perkawinan anak (kesehatan, pendidikan, perceraian, beban sosial dll) , tidak menjamin dapat diselesaikan dengan ditingkatkannya batas minimum usia perkawinan anak perempuan. Masalah-masalah kongrit terkait perkawinan anak tidak murni disebabkan aspek usia semata.

Keempat, mengenai ketentuan pasal 7 ayat (2) mengenai dispendasi perkawinan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa “frase penyimpangan” masih dibutuhkan untuk sebagai “pintu darurat” apabila terdapat hal-hal memaksa atas orang tua untuk kawin.

Menurut penulis, dalam kata *frase penyimpangan* diatas ada dua frase yaitu “hanya” pada yang lalu, sedangkan yang baru “serta” dan seterusnya. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi sesudah direview menyebut perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 (enam belas)

tahun dan dalam hal penyimpangan ayat (1) Pasal ini diminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang diminta oleh kedua orangtua pihak pria atau wanita.

Kelima, MK justru memperbolehkan dispensasi perkawinan di luar mekanisme pengadilan, dengan alasan hambatan akses untuk menjangkau dan meminta dispensasi ke pengadilan. MK bahkan merekomendasikan dispensasi dapat dikeluarkan selain ke Kantor Urusan Agama (KUA), juga ke Kecamatan, kelurahan bahkan kepala desa dengan alasan kemudahan akses.

Mahkamah Konstitusi, dalam pertimbangan putusannya yang dibacakan pada Kamis, menolak uji materi atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pasal 7 ayat 1. Majelis hakim Konstitusi mengatakan tidak ada jaminan peningkatan batas usia menikah dari 16 tahun ke 18 tahun untuk perempuan akan dapat mengurangi atau masalah perceraian, kesehatan, serta masalah sosial.

"Tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya," kata anggota majelis hakim Konstitusi, Patrialis Akbar. Mahkamah Konstitusi juga menolak penambahan usia nikah kaum perempuan, karena dimasa depan kemungkinan batas minimal menikah perempuan di usia 18 tahun bukanlah yang ideal. Mereka juga

berpendapat disejumlah negara batas usia bagi perempuan untuk menikah itu beraneka, mulai 17 tahun, 19 tahun dan 20 tahun.

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Hakim Maria Farida Indrati memiliki alasan yang berbeda (*dissenting opinion*), yakni: Perkawinan anak memiliki dampak terhadap fisik, intelektual, psikologis, dan emosional yang mendalam termasuk dampak kesehatan terhadap anak-anak, selain itu perkawinan anak hampir selalu berdampak pada terputusnya masa sekolah terutama bagi anak perempuan dan mengakibatkan program wajib belajar 12 tahun tidak terpenuhi. Perkawinan anak juga akan menghalangi kesempatan mereka untuk mengembangkan potensinya untuk menjadi seorang dewasa yang mandiri (otonom), berpengetahuan, dan berdayaguna. Bagi anak perempuan yang kawin saat mereka masih anak-anak juga menjadi mudah terekspos terhadap berbagai bentuk penindasan dan kekerasan (seksual dan non seksual) dalam perkawinan. Dengan melihat berbagai dampak yang terjadi karena adanya praktik perkawinan anak maka terlihat bahwa pengaturan tentang batas usia perkawinan, khususnya bagi anak perempuan dalam pasal 7 Undang-undang Perkawinan tersebut telah menimbulkan permasalahan dalam implementasinya.

Berdasarkan beberapa alasan sebagaimana tersebut, Hakim Maria Farida Indrati berpendapat bahwa frasa umur 16 (enam belas) tahun dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) Undang-undang 1945.

Selain itu, adapun alasan-alasan yang lain, yaitu:

- a. Perkawinan anak akan membahayakan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan menempatkan anak dalam situasi rawan kekerasan dan diskriminasi.
- b. Perkawinan membutuhkan kesiapan fisik, psikis, sosial, ekonomi, intelektual, budaya, dan spiritual.
- c. Perkawinan anak tidak dapat memenuhi syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 yaitu adanya kemauan bebas dari calon mempelai oleh karena mereka belum dewasa.

Berdasarkan uraian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang dijelaskan diatas bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Ayat (2) berbunyi “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita”. Baik pasal tersebut maupun penjelasannya, tidak menyebutkan hal apa yang dapat dijadikan dasar bagi suatu alasan yang penting, umpamanya keperluan yang mendesak bagi kepentingan keluarga, barulah dapat diberikan dispensasi tersebut.

Ketentuan tersebut secara eksplisi mengisyaratkan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria yang belum mencapai umur

19 (sembilan belas) tahun atau wanita yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun sebagai pernikahan dibawah umur yang harus memiliki konsekuensi hukum. Pernikahan dibawah umur oleh pasangan yang belum memenuhi batas usia pernikahan pada hakekatnya suatu pernikahan yang dikerjakan oleh seseorang pada usia anak-anak.

Dari sisi lain, Andy Yentriyani, MA dari Komnas Perempuan menyatakan tahun 2009 diperkirakan ada 700.000 anak yang dinikahkan dengan berbagai alasan. Menurut Anisfriyanti Damanik, SH dari LBH APIK, dampak atau akibat dari adanya perkawinan dibawah umur adalah terjadinya pelanggaran Undang-undang (UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak), pelaku perkawinan dibawah umur menjadi rentan terhadap KDRT dan perceraian, ekonominya menjadi tidak stabil, kesehatan reproduksinya yang belum matang bisa menyebabkan persoalan kesehatan yang cukup besar, terputusnya pendidikan, dan masih rentan dalam ketidakpahaman akan hak dan kewajiban sebagai suami-istri.

#### **B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014**

Al-Qur'an merupakan sumber utama untuk hukum Islam yang meletakkan dasar dan prinsip umum hukum Islam. Dalam bentuk masyarakat Indonesia pelaksanaan perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Atas dasar menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemashlahatan, hakim mahkamah konstitusi menetapkan batas usia minimum menikah bagi perempuan 16 (enam

belas) Tahun dan bagi laki-laki 19 (sembilan belas) Tahun. Hakim mahkamah konstitusi menganggap putusan tersebut berdasarkan pada nilai keadilan yaitu melindungi hak konstitusional batas usia minimal menikah bagi perempuan 16 (enam belas) tahun. Akan tetapi putusan tersebut terkesan tidak sesuai dengan hukum Islam maupun Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam pandangan hukum Islam hakim memiliki kedudukan yang tinggi, sebab hakim dipandang sebagai pemerhati dan penggali hukum dengan segenap kemampuannya untuk menyelesaikan problematika manusia ketika hukum tersebut belum pernah ada. Penulis memandang derajat hakim sama dengan mujtahid atau dapat juga disebut ulil amri. Dalam Al-Qur'an dijelaskan adanya kewajiban untuk patuh terhadap ulil amri.

Al-Qur'an Surah An-Nisa : 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*<sup>91</sup>

Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangannya bersifat final dan tidak bisa untuk diajukan upaya hukum.

<sup>91</sup>Q.S. An-Nisa : 49



Sebab, Mahkamah Konstitusi melakukan kekuasaan kehaikan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum yang adil. Institusi kehakiman ini mempunyai wewenang untuk melakukan judicial review Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945.<sup>92</sup>

Mengenai pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) ditolak dalam Mahkamah Konstitusi dengan penafsiran pada pasal tersebut adalah tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkan batas usia pernikahan untuk wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun akan mengurangi angka perceraian, menanggulangi masalah kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya. Mahkamah Konstitusi juga menolak penambahan usia menikah bagi kaum perempuan, karena dimasa depan batas minimal menikah perempuan di usia 18 tahun bukanlah yang ideal. Lagi pula, beberapa putusan No.49/PUU/XI/2011, Putusan No.3739/PUU-VIII/2010 dan Putusan No.15/PUUV/2007 pun telah mempertimbangkan batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-undang yang sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan atau upaya legislatif review. Hal ini sepenuhnya kewenangan pembentuk Undang-undang, apapun pilihannya tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

Menurut majelis hakim pengadilan agama kelas 1A tanjung karang mengenai Putusan MK Nomor 30-74/PUU/2014 sudah sangat tepat dan hakim

---

<sup>92</sup> CST Kansil dan Christine ST Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia (Pengertian Tata Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945 Hingga Kini)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 185-187

majelis sangat setuju dengan adanya putusan tersebut, karena apabila batas usia dinaikan tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa akan mengurangi angka perceraian, menanggulangi masalah kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya. Apabila batas usia dinaikan justru akan dikhawatirkannya permohonan dispensasi menikah akan semakin meningkat.

Dalam hal ini hakim-hakim Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian bukan hanya berdasarkan pada Pasal-pasal yang tertulis didalam Undang-undang Dasar tetapi pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut juga mengambil dari living law atau hukum yang hidup didalam masyarakat. Sehingga jika dianalisis dengan teori keadilan maka putusan tersebut sudah memenuhi unsur keadilan, yakni keadilan korektif yang menyangkut pembetulan,<sup>93</sup> dalam hal ini bunyi dari Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan yang bertentangan dengan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945. Terkait batas minimal usia menikah bagi perempuan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 terdapat penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam KHI Pasal 2 dan 3 dijelaskan mengenai dasar-dasar perkawinan bahwa suatu perkawinan merupakan akad yang sangat kuat, sedangkan tujuan dari perkawinan yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 22

<sup>94</sup> Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991)*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2000), hlm. 14.

Pasca putusan mahkamah konstitusi terkait ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan menurut penulis terjadi pemahaman yang keliru dalam masyarakat terkait penyikapan putusan Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014, dimana batas minimal usia menikah bagi perempuan 16 (enam belas) tahun. Kalau memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 bila dicermati tidaklah memberikan pengakuan terhadap anak perempuan, karena dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 menurut penulis bertolak belakang dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ketentuan tersebut tentukan sebuah pernikahan dalam pandangan negara apabila pernikahan yang dilakukan dicatatkan atau tercatat pada lembaga yang bertugas, artinya perkawinan sebuah lembaga terjadi menurut cara yang sudah diatur dalam perundang-undangan dan bisa pula terjadi diluar prosedur yang telah ditetapkan Undang-undang tersebut, seperti perkawinan dibawah tangan (nikah sirri) yang secara agama dipandang sah, namun tidak tercatat dilembaga yang mengurus perkawinan.

Menurut penulis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 merupakan penyempurnaan tanpa mempersoalkan usia perkawinan 16 (enam belas) tahun. Islam memandang pendewasaan usia perkawinan, pernikahan adalah suatu bentuk ibadah yang sakral dalam Islam. Pernikahan bukan hanya sekedar legalitas hubungan seksual semata. Secara fitrah, menikah akan memberikan ketenangan bagi setiap manusia, sebagai risalah

yang menyeluruh dan sempurna. Islam telah memberikan tuntunan pernikahan yang harus dipahami oleh setiap muslim. Tujuannya agar pernikahan itu berkah dan bernilai ibadah serta benar-benar bagi suaminya. Di dalam Islam tidak ada penetapan usia minimal pernikahan itu tercapai, tidak ada batasan usia dimana seorang laki-laki dan wanita dapat menikah, pernikahan juga bukanlah perampasan hak anak, pernikahan adalah perpindahan perwalian dari seorang ayah kepada suami. Ayah menyerahkan tanggungjawab, mengasihi, menafkahi, melindungi, mendidik dan memenuhi semua hak anak perempuan kepada laki-laki yang ia percayai mampu memikul tanggungjawab tersebut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi menolak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan yang merupakan salah satu bentuk pembaharuan yang disepakati mengenai batasan persyaratan perkawinan. Apabila batasan usia minimum perkawinan dinaikan, hakim meyakini hal tersebut tidak menjadi suatu jaminan untuk mengurangi atau menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat pernikahan anak, dan adapun relevansinya putusan tersebut apabila batas usia menikah dinaikkan akan berpengaruh terhadap banyaknya permohonan dispensasi menikah, hal ini akan semakin berpengaruh apabila tidak diimbangi dengan pencegahan lain terkait pernikahan dibawah umur yang ditetapkan, serta didalam masyarakat dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang batas usia perkawinan didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan *Urf* (tradisi) dalam masyarakat. Hakim pengadilan agama kelas 1A tanjung karang memandang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) masih sangat efektif diterapkan ditengah masyarakat.

## B. SARAN

1. Kepada hakim diharapkan lebih meningkatkan perhatian terhadap masalah-masalah yang melandasi adanya perkawinan dibawah usia, maka perlu upaya penemuan hukum baru terkait masalah batas usia menikah.
2. Bagi pemerintah diharapkan untuk memperhatikan batas usia yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, lebih meningkatkan kerjasama untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang dampak yang terjadi dengan adanya pernikahan dibawah umur dengan membentuk sebuah program nasional pemerintah untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat, seperti membentuk instansi atau team khusus yang langsung turun kelapangan untuk memberikan penyuluhan akan dampak bahaya pernikahan dibawah umur, selain itu memberikan pembelajaran tentang dampak pernikahan dibawah umur khususnya anak-anak yang menjelang usia remaja juga dapat menjadi jalan untuk menekan tingginya pernikahan dibawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Utama

Abdurrahman Al-Jaziri.1994.*Khitabul Fiqh Ala Madzahibul Arba'ah*. Alih Bahasa Moh Zuhri Dapl, Tafl, Dkk. *Fiqh Empat Mazhab Jilid 4*.Surabaya: Adhi Grafindo.

Ahmad Mustafa Al-Maraghi.1986.*Terjemah Tafsir Al-Maraghi Juz 5*, Diterjemahkan oleh Bahrn Abu Bakar dan Hery Noer Aly, *Tafsir Al-Maraghi*.Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang.

Al-Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalaniy.*Bulughul Maram*, Diterjemahkan oleh M Maftuhin Sholeh an-Nadwi dan Muhammad Husein Muqofi, *Kumpulan Hadist-Hadist Hukum Islam Terjemah Bulughul Maram*.Surabaya: Al Hidayah

Departemen Agama RI.2009.*Al-Qur'an dan Terjemahannya*.Bandung: Penebit Hilal.

Departemen Agama RI.2010.*Al-Qur'an dan Terjemahnya*.Bandung: Al-Hikmah.

Departemen Agama RI.t.th.*Al-Qur'an dan Terjemahnya*.Surabaya: Fajar Mulya.

### B. Sumber Pokok

Abdul Rachmad Budiono.2005.*Pengantar Ilmu Hukum*.Malang: Bayumedia Publishing.

Abdul Rahman Ghozali.2003.*Fiqh Munakahat*.Jakarta: Kencana.

Abdulkadir Muhammad.2014.*Hukum Perdata Indonesia*.Bandung: PT Citra Aditya Abadi.

Ahmad Ahzar Basir.t.th.*Hukum Perkawinan Islam*.Jakarta: Perspustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN.

Ahmad Warson Munawir.2002.*Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*.Surabaya: Pustaka Progressif.

Ali Yusuf As-Subki.2012.*Fiqh Keluarga*.Jakarta: Amzah.

Amir Syarifuddin.2007.*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*.Jakarta: Kencana.



- Amir Syarifuddin.2008.*Ushul Fiqh*.Jakarta: Prenada Media.
- Aziz, Abdul Wahhab.2015.*Fiqh Munakahat*.Jakarta: Amzah
- Bambang Sutiyoso.2009.*Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*.Yogyakarta: UII Press.
- Beni Ahmad Saebani.2013.*Fiqh Munakahat I*.Bandung: CV Pustaka Setia.
- Budiono M.A.2005.*Kamus Ilmiah Populer Internasional*,Surabaya: Karya Harapan.
- Cholid Narbuko, Abu Ahmadi.1997.*Metodelogi Penelitian*.Jakarta: Bumi Aksara.
- CST Kansil, Christine ST Kansil.2001.*Hukum Tata Negara Republik Indonesia (Pengertian Tata Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945 Hingga Kini)*.Jakarta: Rineka Cipta.
- Dedi Junaedi.2003.*Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As Sunnah)*.Jakarta: Akademika Pressindo.
- Dewani Romli.2009.*Fiqh Munakahat*.Lampung: Percetakan Nur Utopia Jaya.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.2000.*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991)*.Jakarta: Departemen Agama RI.
- Elizabeth B Hurlock.1994.*Psikologi Perkembangan suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*.Jakarta: Anggota IKAPI.
- H.S.A Al-Hamdani.2002.*Risalah Nikah*.Jakarta: Pustaka Amani.
- Hussein Muhammad.2007.*Fiqh Perempuan (Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender)*.Yogyakarta: LkiS.
- Jimly Asshiddiqie.2010.*Hukum Acara Pengujian Undang-undang*.Jakarta: Grafika.
- Kaelani.2005.*Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*.Yogyakarta: Padigma.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*.2011.Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kartini Kartono.1996.*Metodologi Riset Sosial*.Bandung: Mandar Maju.
- Lilik Mulyadi.2002.*Pengadilan Anak di Indonesia*.Bandung: Mandar Maju.

- M Ali Hasan.2004.*Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*.Jakarta: PT Raja Grafindo.
- M Quraish Shihab.2005.*Tafsir Al Misbah*.Jakarta: Lentera Hati.
- Mardalis.2004.*Metode Penelitian Sebagai Pendekatan Proposal*.Jakarta: Bumi Aksara.
- Maruarar Siahaan.2005.*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Moch Isnani.2012.*Hukum Perkawinan Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh Mahfud.2011.*Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*.Jakarta: Rajawali Press.
- Muhammad Abu Zahrah.1994.*Ushul Fikih*.Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014.
- Sudikno Mertokusumo.1998.*Hukum Acara Perdata Indonesia*.Yogyakarta: Liberty.
- Sugiono.2001.*Metode Penelitian Administrasi*.Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto.1998.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutrisno Hadi.1983.*Metodelogi Research*.Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Syaikh Hasan Ayyub.2004.*Fikih Keluarga*.Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Tihami, Sohari Sahrani.2010.*Fikih Munakahat*.Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wahyu MS.1986.*Wawasan Ilmu Sosial Dasar*.Surabaya: Usaha Nasional.

### **C. Sumber Pelengkap**

- Ahmad Asrori.2015.*Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Muslim, Jurnal Al-Adalah*, Vol.12, No.2.
- Hasil Wawancara dengan Hakim pada tanggal 14 Januari 2019 di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.

#### **D. Undang-Undang**

Inpres tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006  
tentang Pengadilan Agama.



# Skripsi\_Ayu

## ORIGINALITY REPORT

<b>16%</b>	<b>17%</b>	<b>4%</b>	<b>8%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet Source	5%
2	<b>aphiedmz.blogspot.com</b> Internet Source	2%
3	<b>adoc.tips</b> Internet Source	1%
4	<b>id.scribd.com</b> Internet Source	1%
5	<b>repository.uinsu.ac.id</b> Internet Source	1%
6	<b>wathon22.blogspot.com</b> Internet Source	1%
7	<b>skripsiiain.blogspot.com</b> Internet Source	1%
8	<b>imanullahrijal.blogspot.com</b> Internet Source	1%
9	<b>Submitted to Sriwijaya University</b> Student Paper	1%

10	<a href="http://nineelc.wordpress.com">nineelc.wordpress.com</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	1%
12	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	1%
13	<a href="http://kikandian.blogspot.com">kikandian.blogspot.com</a> Internet Source	1%

Exclude quotes ☒ On

Exclude bibliography ☒ On

Exclude matches ☐ < 1%